

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

Disusun Oleh :

St Nur Fadilah Utami

4519013073



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam
Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : St Nur Fadilah Utami

NIM : 4519013073

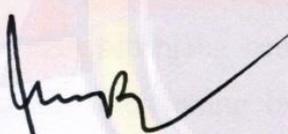
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Muhlus Ruslan, SE., M. Si.

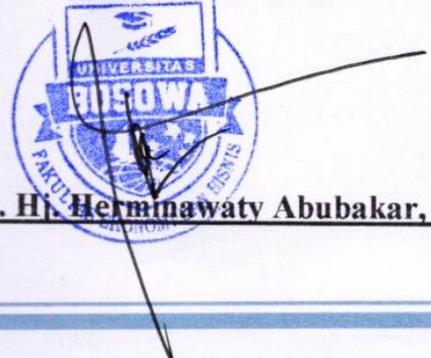

Thanwain, SE., M. Si.

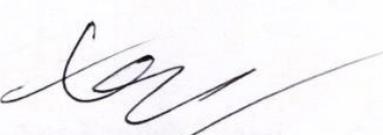
Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Akuntansi**


Dr. H. Hermawaty Abubakar, SE., M.Si


Thanwain, SE., M. Si.

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : St Nur Fadilah Utami
NIM : 4519013073
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam
Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Mahasiswa yang bersangkutan



St Nur Fadilah Utami
St Nur Fadilah Utami

4519013073

PRAKATA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa, dengan mengambil judul Skripsi **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar”** .

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Khaeruddin dan Ibu Hj Jumrah Talib S.Pd., Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandara terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan memberikan motivasi, Terimakasih Untuk segala pengorbanan dan perjuangan untuk kehidupan saya Berkat Do'a dan Dukungan Mama dan Bapak saya bisa berada sampai di titik ini semoga kalian sehat selalu. Mama Dan Bapak harus selalu ada di setiap perjalanan & Pencapaian Hidup saya.
2. Kepada Adik Saya Satu satunya Muhammad Fakhri Utama yang selalu setia mengantar dan menemani penulis selama proses pengurusan tugas

Akhir terimakasih atas dukungan, dan doa sehingga penulis bisa sampai di titik ini

3. Rektor Universitas Bosowa Makassar, Bapak Prof Dr. Ir. Batara Surya, ST., M.Si.
4. Bapak Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si dan Bapak Thanwain, SE., M.Si selaku pembimbing peneliti atas waktu, tenaga, motivasi, serta segala arahan, bantuan, yang telah diberikan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Ibu Dr. Hj. Herminawati Abubakar, S.E., M. Si. Selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
6. Kepada Bapak Thanwain, SE., M.Si selaku ketua Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
7. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan para pegawai yang telah membantu memberikan data yang peneliti butuhkan.
8. Kepada Sahabat saya Anitabaccang seseorang yang selalu mendengarkan keluh kesah saya menemani dalam keadaan suka maupun duka yang selalu memberikan dukungan, Doa Serta menjadi pengingat dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan saksi kehidupan saya
9. Idith Gavrilla dan Geby Gabriella teman seperjuangan selama penulis di Rantau yang selalu menemani dan saling mensupport selama proses perkuliahan, di kala mental sedang down, terimakasih untuk segala

kebersamaan kita. Semoga persahabatan ini akan terus berlanjut sampai jumpa di kesuksesan masing masing

10. Kepada seluruh Keluarga besar dan Teman Teman yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang ikut memberikan bantuan dan dukungannya kepada peneliti untuk penyelesaian studi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa wujud dari skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Aamiin.

Makassar, 03 Juli 2023

St Nur Fadilah Utami

ABSTRAK

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah berhasil dilaksanakan dengan baik. SAP memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan terintegrasi, memastikan penggunaan standar dan prosedur yang konsisten dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan mengidentifikasi manfaat serta tantangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP memberikan manfaat yang signifikan. Pertama, SAP meningkatkan transparansi laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Melalui standar dan prosedur yang terintegrasi, SAP memastikan konsistensi, akurasi, dan keandalan data dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan transparansi informasi keuangan kepada pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.



ABSTRACT

The implementation of Government Accounting Standards (SAP) in the preparation of financial statements of the Regional Financial Agency of Polewali Mandar Regency has been successfully executed. SAP provides a structured and integrated framework, ensuring the use of consistent standards and procedures in financial statement preparation. This study aims to analyze the implementation of SAP in the Regional Financial Agency of Polewali Mandar Regency and identify the associated benefits and challenges. The research findings indicate that the implementation of SAP provides significant benefits. Firstly, SAP enhances the transparency of the financial statements of the Regional Financial Agency of Polewali Mandar Regency. Through integrated standards and procedures, SAP ensures consistency, accuracy, and reliability of data in financial statements, thereby enhancing transparency of financial information to stakeholders.

Keywords: *Government Accounting Standards (SAP) implementation, financial statements, Regional Financial Agency of Polewali Mandar Regency.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Lingkup Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perspektif Teori	7
1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	7
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	9
3. Konsep Aset Pemerintah	11
B. Penelitian Terdahulu	13
C. Kerangka Pikir	16
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	17
B. Lokasi Penelitian	17
C. Populasi dan Sampel	17
D. Instrumen Penelitian	18

E. Jenis dan Sumber Data	18
F. Teknik Pengumpulan Data	19
G. Teknik Analisis Data	19
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	21
B. Hasil Penelitian	22
1. Penerapan SAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	22
2. Pengaruh penerapan SAP terhadap transparansi laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar	23
3. Penerapan SAP meningkatkan akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.....	24
4. Konsistensi SAP dan keseragaman laporan keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.	26
5. Penerapan SAP dapat membantu dalam meningkatkan pengelolaan aset dan kewajiban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.	28
6. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar mengukur dan melaporkan kinerja keuangan dengan menggunakan SAP.....	30
7. Kendala atau tantangan yang dihadapi dalam penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar	32
8. Peran pengawasan dan audit dalam memastikan kepatuhan terhadap penerapan SAP	34
9. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar melibatkan pihak-pihak terkait dalam penerapan SAP	36
10. Manfaat Penerapan SAP Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar	38
11. Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandar Dalam Memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang terkandung dalam SAP.....	40

12. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar memastikan akurasi dan keandalan data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SAP	43
13. Pengaruh penerapan SAP terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar	45
14. Indikator Dalam Mengevaluasi keberhasilan penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar	47
15. Perubahan Setelah penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (BKD Kabupaten Polewali Mandar)	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN –LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	17
---------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Penelitian	61
Lampiran 2.	Dokumentasi Penelitian	61
Lampiran 3.	Laporan Neraca 2020 – 2019	64
Lampiran 4.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 2020 -2019.....	66
Lampiran 5.	Laporan Operasional 2020	67
Lampiran 6.	Laporan Perubahan Ekuitas	69
Lampiran 7.	Laporan Realisasi Anggaran	70
Lampiran 8.	Laporan Arus Kas	71
Lampiran 9.	Laporan Arus Kas	73
Lampiran 10.	Laporan Perubahan Saldo 2021 – 2020	74
Lampiran 11.	Laporan Perubahan Ekuiditas	75
Lampiran 12.	Laporan Operasional 2021	76
Lampiran 13.	Neraca	77
Lampiran 14.	Laporan Realisasi Anggaran 2021 – 2020	79
Lampiran 15.	Laporan Perubahan Ekuiditas 2022	80
Lampiran 16.	Laporan Operasional 2022 – 2021	81
Lampiran 17.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran 2022 – 2021	82
Lampiran 18.	Neraca 2022 – 2021	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah lembaga untuk dapat dikatakan mempunyai kinerja yang baik berarti memiliki komponen pelaporan keuangan yang digunakan sebagai alat untuk menilai baik tidaknya kinerja lembaga tersebut. Hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan lembaga untuk maju dan kerjasama antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya berbentuk Laporan keuangan dan laporan kinerja. Pemerintah pusat mengatur bahwa Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan sektor publik merupakan suatu komponen yang penting dalam menciptakan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik. Lembaga-lembaga publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik maka dibutuhkan dedikasi dan integritas yang tinggi.

Badan keuangan daerah harus menggunakan SAP sesuai PP 71/2010, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, hutang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Menghadapi tuntutan aturan tersebut, dalam pencatatan aset pada LKPD, maka Pemda wajib mencantumkan nilai sewajarnya dari suatu

aset. Penggunaan basis akrual berkaitan pula dengan penerapan penyusutan atas aset tetap. Aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah daerah karena nilainya yang sangat signifikan dalam Neraca (Winarno, 2012). Penilaian aset sangat penting bukan saja dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindah tanganan aset/barang milik daerah yang dilelang/dijual, tetapi secara praktis memiliki hubungan langsung dengan, penyajian Neraca daerah. Menurut Setiadi (2008) jika aset tetap tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi opini yang diberikan BPK, karena aset tetap merupakan komponen laporan keuangan yang signifikan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas Widuri Pada tahun 2014 dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara diperoleh hasil bahwa Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara, didapatkan kesimpulan yaitu Evaluasi pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Evaluasi pengukuran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Evaluasi penyajian dan pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rizki Puspita Sari dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah Kota Prabumulih diperoleh hasil Dari keempat aspek tersebut kendala yang dihadapi terdapat pada aspek dipahami dikarenakan kurangnya pemahaman sumber daya manusia mengenai standar akuntansi pemerintahan. Adanya kendala yang terjadi diharapkan dari pemerintahan Kota Prabumulih dapat mengadakan pelatihan pada pegawai penyusun laporan keuangan terutama pegawai yang akan dimutasi ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih.

Badan keuangan daerah kabupaten Polewali Mandar, harus menerapkan PP 71/2010 dalam penyusunan LKPD. Aset yang disajikan Pemda, terdiri dari aset lancar dan aset tetap, harus disajikan dalam nilai yang wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, sedangkan penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jika nilai wajar aset telah dicantumkan dalam laporan keuangan, maka laporan tersebut sudah dapat dikatakan bisa dipercaya dan diandalkan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis penulis melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada badan keuangan

daerah kabupaten Polewali Mandar sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan No. 17 tentang Keuangan Negara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada badan keuangan daerah kabupaten Polewali Mandar dalam menyusun laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP yang diatur oleh perundang-undangan No. 17 tentang Keuangan Negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam melaksanakan penelitian.

2. Bagi Instansi

a. memberikan informasi mengenai Standar Akuntansi pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten Polewali Mandar yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan di lembaga tersebut.

b. Memberikan sumbangsi pemikiran atas permasalahan standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan apabila terjadi kasus yang sama dikemudian hari.

3. Bagi Almamater

- a. Memberikan landasan ilmiah yang berguna dalam memahami analisis Standar Akuntansi pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten Polewali Mandar
- b. Memberikan sumbangan pemikiran yang positif dalam rangka memahami Standar Akuntansi pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten Polewali Mandar

E. Lingkup Penelitian

Dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan diatas, maka lingkup penelitian dari penelitian ini meliputi :

1. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan yang sesuatu aturan pemerintah pusat bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Objek dari penelitian ini yaitu laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini memiliki sistematika yang terdiri dari tiga bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bagian pertama dalam penelitian ini akan didahului dengan halaman sampul, halaman pengesahan, dan daftar isi.

Pada bagian Pertama atau pendahuluan berisi sub bab yaitu : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bagian Kedua atau tinjauan pustaka dan kerangka teori memuat uraian lengkap tentang kajian teori pada penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pikir, yang relevan dan terkait dengan penelitian ini.

Pada bagian Ketiga atau metode penelitian memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, variable penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian yang terstruktur.

Pada bagian Ke Empat, Dengan menyajikan hasil penelitian yang telah kami kumpulkan melalui metode penelitian yang telah dijelaskan secara rinci mencakup temuan dan data yang relevan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Kami akan menjelaskan temuan-temuan tersebut dengan jelas dan objektif.

Setelah menyajikan hasil penelitian, kami akan melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan tersebut. Kami akan menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, kami akan menyajikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Kesimpulan ini akan merangkum temuan-temuan penting. Kami juga akan mengaitkan kesimpulan dengan tujuan penelitian dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan penelitian di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan adalah penggunaan SAP (Mahmudi, 2011). Standar akuntansi diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan (Mardiasmo, 2009)

Undang-undang Keuangan Negara telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan yang mengacu pada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional (Darise, 2008). Pasal 32 UU 17/2003 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. PP 71/2010 mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Laporan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyatakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbunyi: “Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 (5) SAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP.

SAP berisi prinsip-prinsip akuntansi yang menurut Mahmudi (2011) diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan. Manfaat adanya standar akuntansi ini antara lain: digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan; digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya; digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan; diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi dan keandalan laporan keuangan; serta menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Menurut Nurlan Darise (2008) pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.
- b. Menurut Nugraheni dan Subaweh (2008), menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, dimana setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional telah memuat seluruh informasi keuangan yang terjadi, dapat memecahkan semua permasalahan pencatatan keuangan, dan ada cara untuk memecahkan permasalahan pencatatan keuangan

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat (Harahap, 2013).

Tujuan analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil (Munawir, 2016).

Pelaporan keuangan daerah menurut Yuwono, Utomo, Zein, dan Azrafiany (2008) merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dikelola serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan daerah selama satu periode tertentu.

Entitas pelaporan membuat laporan keuangan pemerintah yang dilakukan dengan menggabungkan/ mengkompilasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD). Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Darise, 2008).

Komponen laporan keuangan berdasarkan PP 71/2010 dan menurut Yuwono et.al. (2008:144) meliputi Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Realiasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Setiap entitas pelaporan harus menyajikan laporan-laporan tersebut, kecuali LAK dan LPSAL. Karena LAK hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, sedangkan LPSAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Pemerintah daerah membuat LKPD berdasarkan SAP dengan tujuan untuk memperoleh opini wajar atas penyajian laporannya. Opini wajar diistilahkan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Darise (2008) menjelaskan bahwa pendapat WTP diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima

umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, jika memenuhi kondisi:

- a. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan;
- b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke periode telah cukup dijelaskan;
- c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

3. Konsep Aset Pemerintah

Aset pemerintah yang termuat dalam laporan keuangan (Neraca), didefinisikan oleh PP 71/2010 dan Darise (2008) sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya (Tanjung, 2008) ke dalam aset lancar dan non-lancar, di mana aktiva tetap merupakan salah satu dari aset non-lancar (Darise, 2008). PSAP 07 menerangkan bahwa aktiva tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau

dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian Neraca (Darise, 2008). Aktiva tetap pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi: (a) tanah, (b) peralatan dan mesin, (c) gedung dan bangunan, (d) jalan, irigasi, dan jaringan, (e) aset tetap lainnya, dan (f) konstruksi dalam pengerjaan (Darise, 2008, Permendagri 17/2007, dan PSAP 07).

Pengukuran menurut PP 71/2010 sebagai proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengukuran dan penilaian aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, bila tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan (Mahmudi, 2011). Biaya perolehan menurut Darise (2008) adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Dampak signifikan dari metode penyusutan yang digunakan terhadap laporan keuangan harus mengungkapkan: (a) Beban penyusutan untuk periode berjalan, (b) Saldo kelas utama dari aktiva yang dapat disusutkan, menurut sifat dan fungsi, (c) Akumulasi penyusutan, baik menurut kelas utama aktiva yang dapat disusutkan maupun 89 dalam jumlah total, (d)

Sesuai uraian umum penggunaan metode dalam menghitung penyusutan berkaitan dengan kelas utama aktiva yang dapat disusutkan Kieso et.al. (2008).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini Sebagai Berikut:

1. Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas Widuri (2014) Judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara” Hasil Penelitian: Evaluasi pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Evaluasi pengukuran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada DPPKAD juga sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Evaluasi penyajian dan pengungkapan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada DPPKAD juga sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Mohammad Fachmi Rizaldy (2016) Judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual (Accrual Basis) Menurut Pp Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Malang)” Hasil Penelitian: Laporan keuangan Pemerintah Kota Malang tahun 2015 telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual. Perbedaan bentuk laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PP No. 71 Tahun 2010 terlihat pada penambahan laporan keuangan seperti Laporan

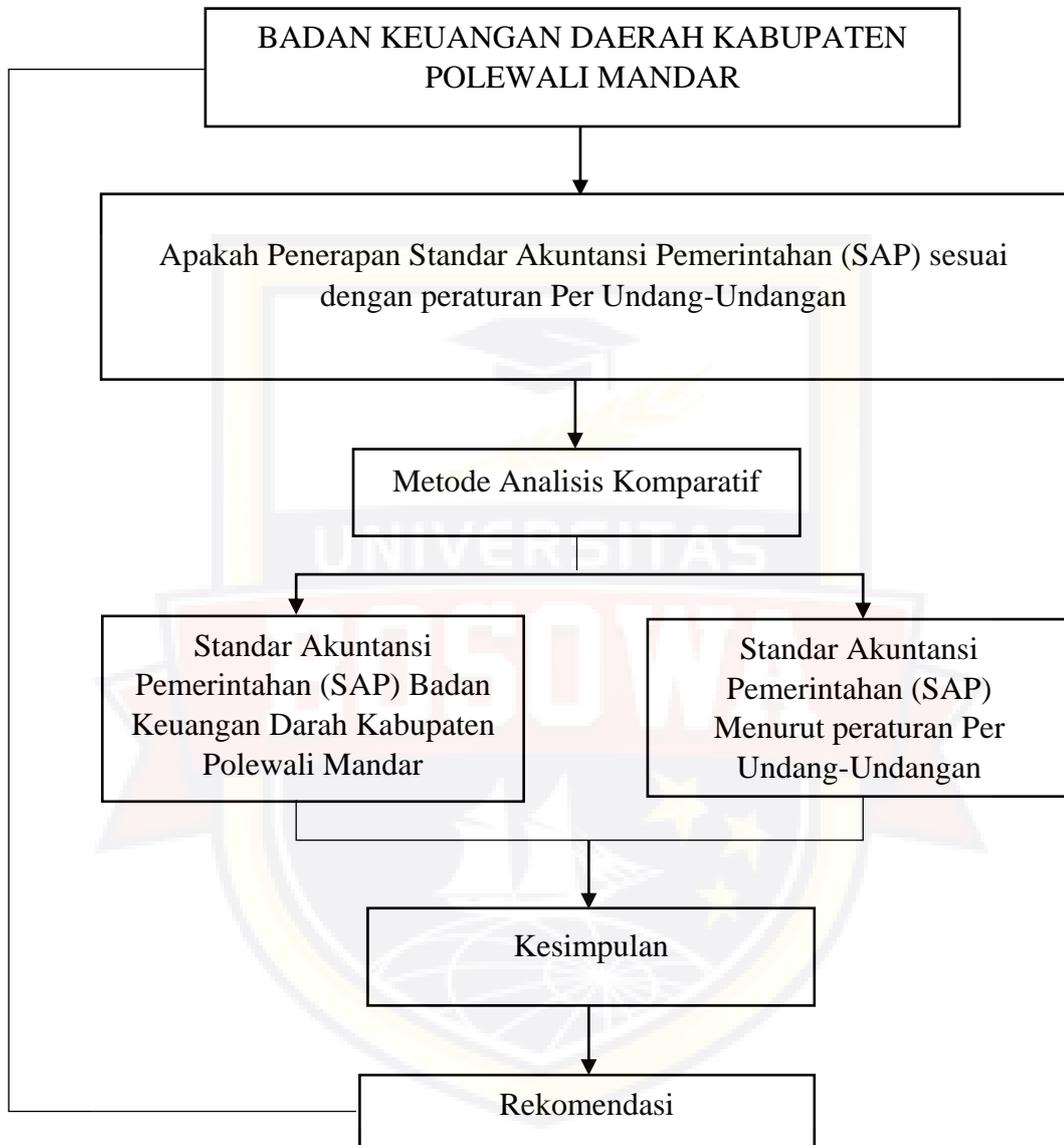
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

3. Hani Siti Hanifah, Eliya Fatma Harahap, Intan Noviyanti Hidayat (2019) Judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan Kualitas Laporan Keuangan” Hasil Penelitian: Variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Garut. Variabel sistem pengendalian intern juga berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Garut.
4. Enda Baisida Lauma, Jenny Morasa, Lintje Kalangi (2016) Judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow” Hasil Penelitian: Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual untuk aset tetap sesuai dengan PP 71/2010 tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, terdapat kendala dalam perbedaan pencatatan aset antara divisi akuntansi dan divisi aset. Laporan keuangan juga masih memiliki kendala, seperti aset tidak lancar yang tidak dikuasai SKPD, kurangnya informasi mengenai aset, dan beberapa aset tidak dijelaskan dengan jelas.
5. Rizki Puspita Sari (2018) Judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih” Hasil Penelitian: Laporan keuangan tahunan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih telah diterapkan sesuai dengan aspek-aspek kualitatif seperti dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Kendala yang dihadapi terdapat pada aspek pemahaman sumber daya manusia mengenai standar akuntansi pemerintahan. Disarankan agar pemerintah Kota Prabumulih menyelenggarakan pelatihan kepada pegawai dalam penyusunan laporan keuangan.



C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif. penelitian deskriptif merupakan kegiatan mengumpulkan, mengelola dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) objek dari data penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315, telepon 0428-21413.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang menjadi target generalisasi dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *cluster random sampling* dengan alasan bahwa karyawan Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar terbagi dalam beberapa bagian atau kelompok kerja berdasarkan struktur organisasi perusahaan.

D. Instrumen Penelitian

Alat atau instrumen yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data untuk penyusunan penelitian ini berupa dokumen dan Peraturan Bupati terkait laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

1. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data– data yang diperlukan berupa dokumen – dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh melalui proses permintaan peneliti secara langsung kepada bagian akuntansi.
2. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian. Informan yang bersangkutan dalam masalah penelitian ini adalah kepala bagian akuntansi dan staf bagian akuntansi.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dibuat oleh DPPKAD selaku Kepala SKPD (PPKD).

Sumber data penelitian ini berasal dari bagian internal DPPKAD khususnya data bagian akuntansi yang menyusun bagian laporan keuangan pemerintahan daerah. Data yang diperoleh berupa Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Data-data tersebut digunakan untuk melihat bagaimana

penerapan standar yang ditetapkan pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan daerah berupa SAP pada DPPAKD Kabupaten Polewali Mandar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Alat atau instrumen yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data untuk penyusunan penelitian ini berupa dokumen dan Peraturan Bupati terkait laporan keuangan pemerintah daerah adalah dokumentasi dan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan data-data yang telah didapat dari Dinas yang bersangkutan. Data yang diperoleh dihubungkan dengan teori yang menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan Dinas tersebut kemudian diadakan pembahasan masalah yang nantinya dari hasil pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan pada dinas yang bersangkutan melalui studi literatur yang meliputi penerapan prosedur akuntansi untuk pendapatan, pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi selain kas.
2. Melakukan wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan dinas yang bersangkutan.

3. Menarik kesimpulan atas hasil penelitian berupa sesuai tidaknya penerapan SAP dalam proses penyusunan laporan keuangan, serta memberikan saran perbaikan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315, telepon 0428-21413.

Visi

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib, Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Misi

1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah
2. Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang keuangan dan aset daerah; dan

- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan SAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Penerapan SAP (System Application and Product in Data Processing) telah membawa perubahan yang signifikan dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dengan menggunakan SAP, Badan Keuangan Daerah dapat mengintegrasikan dan mengotomatiskan berbagai proses keuangan dan akuntansi yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

SAP memungkinkan pencatatan transaksi keuangan yang lebih akurat dan efisien melalui modul-modul yang terintegrasi, seperti modul akuntansi, penggajian, pengadaan, dan pengelolaan aset. Setiap transaksi keuangan yang terjadi di Badan Keuangan Daerah dapat langsung tercatat dalam sistem SAP, sehingga meminimalkan risiko kesalahan manusia dan memastikan data yang lebih konsisten dan terstruktur.

Selain itu, SAP juga memfasilitasi proses pelaporan keuangan yang lebih cepat dan akurat. Data keuangan yang telah terintegrasi dalam SAP dapat diolah secara otomatis untuk menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan terkini. Dengan adanya SAP, Badan Keuangan Daerah dapat menghindari keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan dan mempercepat proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi keuangan yang tepat Waktu. Adapun

Berdasarkan Wawancara yang disampaikan Oleh Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si. Ak Sebagai Berikut:

"Melalui penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan, kami telah merasakan perubahan yang luar biasa dalam hal efisiensi dan akurasi. Sistem SAP memungkinkan kami untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan dengan lebih terstruktur dan otomatis. Kami melihat peningkatan signifikan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat. Dengan SAP, kami dapat fokus pada analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih efektif." (Wawancara 21 Juni, 2023)

2. Pengaruh penerapan SAP terhadap transparansi laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Dengan penerapan SAP, semua transaksi keuangan direkam secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Data keuangan yang tercatat dalam SAP mencakup rincian transaksi, tanggal, dan pihak terlibat. Hal ini memberikan tingkat transparansi yang tinggi dalam laporan keuangan, karena informasi tentang setiap transaksi dapat dengan mudah diakses dan diverifikasi.

SAP memungkinkan aksesibilitas informasi keuangan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait, seperti auditor, pengawas, dan masyarakat umum. Data keuangan yang terintegrasi dalam SAP dapat diakses dengan tingkat akses yang telah ditentukan, memastikan bahwa informasi yang relevan dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang dengan cepat dan mudah.

SAP mencatat jejak audit (audit trail) yang lengkap untuk setiap transaksi keuangan. Hal ini memungkinkan pemantauan dan pelacakan yang akurat terhadap setiap perubahan atau pergerakan dana dalam sistem. Dengan adanya jejak audit yang terekam dalam SAP, transparansi laporan keuangan meningkat

karena semua aktivitas keuangan dapat ditelusuri kembali hingga sumber dan tujuan dana.

Pengendalian Internal yang Ditingkatkan: Penerapan SAP membantu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam menerapkan pengendalian internal yang lebih baik. SAP memungkinkan pengaturan aturan dan prosedur yang konsisten dalam setiap tahap proses keuangan. Dengan adanya pengendalian internal yang kuat, risiko penyalahgunaan dana dan kecurangan dapat ditekan, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam laporan keuangan.

Dengan demikian, penerapan SAP berkontribusi secara positif dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Data yang terdokumentasi dengan baik, aksesibilitas informasi yang lebih baik, pemantauan transaksi yang akurat, dan pengendalian internal yang ditingkatkan semuanya berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik dan dapat dipercaya oleh stakeholders.

Menurut Bapak Muhammad Asdar "Penerapan SAP telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan kami. Dengan SAP, kami dapat dengan mudah mengakses dan membagikan informasi keuangan kepada pihak yang berwenang. Jejak audit yang terekam dalam sistem juga membantu kami dalam memastikan bahwa setiap perubahan dan pergerakan dana dapat diidentifikasi dan diverifikasi secara akurat. Transparansi yang lebih tinggi dalam laporan keuangan kami telah meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap entitas kami." (Wawancara 21 Juni, 2023)

3. Penerapan SAP meningkatkan akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Pencatatan Transaksi yang Akurat Dengan SAP, semua transaksi keuangan dicatat secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Data yang tercatat dalam SAP mencakup rincian transaksi, tanggal, dan pihak terkait. Hal ini memastikan bahwa setiap penggunaan dana terdokumentasi secara akurat dan dapat dilacak kembali. Pencatatan transaksi yang akurat merupakan aspek penting dalam akuntabilitas, karena memungkinkan Badan Keuangan Daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dan penerimaan dana.

Pengendalian Internal yang Ditingkatkan, Dengan Penerapan SAP memungkinkan penerapan pengendalian internal yang lebih baik. SAP dapat mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam setiap tahapan proses keuangan, seperti pembayaran faktur, pembebanan anggaran, dan penggajian. Pengendalian internal yang kuat membantu mencegah penyalahgunaan dana dan kecurangan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Pelacakan dan Audit yang Lebih Mudah, SAP mencatat jejak audit (audit trail) yang lengkap untuk setiap transaksi keuangan. Hal ini memungkinkan pelacakan dan audit yang lebih mudah terhadap aktivitas keuangan. Data yang terdokumentasi dengan baik dalam SAP memudahkan auditor dan pengawas dalam memeriksa dan memverifikasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Dengan adanya pelacakan dan audit yang efektif, Badan Keuangan Daerah dapat memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Pelaporan yang Lebih Cepat dan Akurat, SAP memungkinkan proses pelaporan keuangan yang lebih cepat dan akurat. Data keuangan yang telah terintegrasi dalam SAP dapat diolah secara otomatis untuk menghasilkan laporan

keuangan yang lengkap dan terkini. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat merupakan bagian penting dalam akuntabilitas, karena memungkinkan stakeholders untuk memahami kondisi keuangan dan kinerja Badan Keuangan Daerah secara lebih baik.

Dengan demikian, penerapan SAP berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Pencatatan transaksi yang akurat, pengendalian internal yang ditingkatkan, pelacakan dan audit yang lebih mudah, serta pelaporan yang cepat dan akurat semua berkontribusi dalam memastikan bahwa Badan Keuangan Daerah bertanggung jawab dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan mereka.

Adapun Pendapat yang disampaikan Oleh Bapak. Nurdin terkait pengaruh penerapan SAP terhadap akuntabilitas dapat sebagai berikut:

"Dengan penerapan SAP, kami telah mengalami peningkatan signifikan dalam hal akuntabilitas. Pencatatan transaksi yang akurat, pengendalian internal yang lebih baik, dan pelaporan yang cepat dan akurat telah membantu kami dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana dan menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada stakeholders kami. Kami merasa lebih akuntabel dalam pengelolaan keuangan kami berkat penerapan SAP."(Wawancara 21 Juni, 2023)

4. Konsistensi SAP dan keseragaman laporan keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

SAP memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi konsistensi dan keseragaman laporan keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Standar dan Prosedur yang Terintegrasi, SAP memungkinkan Badan Keuangan Daerah untuk mengatur standar dan prosedur yang konsisten dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam SAP, pengguna dapat

mengonfigurasi berbagai elemen seperti jenis akun, struktur anggaran, dan format laporan. Dengan standar dan prosedur yang terintegrasi dalam sistem, semua pengguna SAP akan mengikuti pedoman yang sama, memastikan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan.

Penggunaan Data yang Terintegrasi. SAP mengintegrasikan berbagai modul dan fungsi, mulai dari akuntansi hingga penggajian dan pengelolaan aset. Data keuangan yang tercatat dalam SAP berasal dari sumber yang sama dan digunakan secara konsisten di seluruh organisasi. Hal ini meminimalkan kesalahan manusia dan inkonsistensi yang mungkin terjadi saat menggabungkan data dari berbagai sistem terpisah. Dengan penggunaan data yang terintegrasi, laporan keuangan dapat mencerminkan informasi yang seragam dan konsisten.

Format Laporan yang Konsisten, SAP memungkinkan pembuatan format laporan yang konsisten dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Badan Keuangan Daerah. Pengguna SAP dapat mengonfigurasi struktur dan tata letak laporan sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa semua laporan keuangan yang dihasilkan dari SAP memiliki format yang seragam, memudahkan pemahaman dan perbandingan antara periode laporan yang berbeda.

Validasi dan Kontrol Otomatis, SAP dapat memberikan validasi otomatis terhadap data dan transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem. Ini berarti bahwa aturan bisnis dan validasi yang telah ditentukan sebelumnya akan diterapkan secara konsisten pada setiap transaksi. Dengan adanya validasi otomatis, kesalahan dan inkonsistensi dalam laporan keuangan dapat dihindari,

memastikan konsistensi dan keseragaman data yang digunakan dalam penyusunan laporan.

Dengan menggunakan SAP, Badan Keuangan Daerah dapat mencapai konsistensi dan keseragaman yang lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan. Standar dan prosedur yang terintegrasi, penggunaan data yang terintegrasi, format laporan yang konsisten, serta validasi dan kontrol otomatis semuanya berkontribusi dalam memastikan laporan keuangan yang seragam dan konsisten di seluruh organisasi.

Adapun Pendapat yang disampaikan Oleh Bapak Muhammad Irfan, terkait pengaruh SAP terhadap konsistensi dan keseragaman laporan keuangan dapat sebagai berikut:

"Dengan penerapan SAP, kami telah berhasil mencapai konsistensi dan keseragaman yang lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan. Standar dan prosedur yang terintegrasi dalam SAP memberikan pedoman yang konsisten bagi seluruh pengguna. Penggunaan data yang terintegrasi dan format laporan yang dapat disesuaikan juga memastikan konsistensi dan keseragaman dalam informasi yang disajikan. Kami percaya bahwa SAP telah membantu kami mencapai laporan keuangan yang lebih seragam dan dapat diandalkan di Badan Keuangan Daerah kami."

5. Penerapan SAP dapat membantu dalam meningkatkan pengelolaan aset dan kewajiban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pencatatan dan Pelacakan Aset, SAP menyediakan modul pengelolaan aset yang memungkinkan Badan Keuangan Daerah untuk mencatat dan melacak aset dengan lebih efisien. Melalui SAP, informasi aset seperti inventaris, nilai, dan lokasi dapat dikendalikan dengan baik. Pengguna dapat memperbarui dan melacak pergerakan aset serta melihat riwayat perawatan dan pemeliharaan.

Dengan demikian, SAP membantu dalam pencatatan yang lebih akurat dan pelacakan yang efektif terhadap aset Badan Keuangan Daerah.

Pemantauan Kewajiban Keuangan, SAP memungkinkan pencatatan dan pemantauan kewajiban keuangan secara terintegrasi. Dengan menggunakan SAP, Badan Keuangan Daerah dapat mencatat dan melacak kewajiban keuangan seperti hutang, pinjaman, dan kontrak dengan lebih sistematis. Hal ini membantu dalam memastikan pemenuhan kewajiban tepat waktu, pengendalian pembayaran, serta perencanaan dan pengelolaan yang lebih baik terkait kewajiban keuangan.

Integrasi dengan Modul Keuangan, SAP menyediakan integrasi antara modul pengelolaan aset dan modul keuangan. Informasi aset yang tercatat dalam SAP dapat secara langsung diintegrasikan dengan proses keuangan, seperti penyusunan laporan keuangan dan perhitungan penyusutan aset. Dengan demikian, SAP memastikan bahwa informasi terkait aset dan kewajiban secara otomatis terhubung dengan proses keuangan, meminimalkan kesalahan manual dan memastikan akurasi data.

Analisis dan Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik, Dengan SAP, Badan Keuangan Daerah memiliki akses ke informasi yang akurat dan terkini terkait aset dan kewajiban. SAP menyediakan kemampuan analitik yang kuat untuk menganalisis data aset dan kewajiban, termasuk perbandingan, proyeksi, dan evaluasi performa. Hal ini membantu pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan aset, pengembangan strategi keuangan, dan pengendalian kewajiban keuangan.

Dengan penerapan SAP, pengelolaan aset dan kewajiban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat ditingkatkan melalui pencatatan yang lebih akurat, pelacakan yang efektif, pemantauan kewajiban keuangan, integrasi dengan modul keuangan, dan analisis data yang lebih baik. SAP membantu memperbaiki proses pengelolaan aset dan kewajiban sehingga Badan Keuangan Daerah dapat mengoptimalkan penggunaan aset dan memenuhi kewajiban keuangan dengan lebih baik.

Adapun Pendapat yang disampaikan Oleh Bapak Nurdin terkait pengaruh penerapan SAP terhadap pengelolaan aset dan kewajiban dapat sebagai berikut:

"Penerapan SAP telah membantu kami dalam meningkatkan pengelolaan aset dan kewajiban di Badan Keuangan Daerah. Melalui SAP, kami dapat dengan mudah mencatat dan melacak aset dengan lebih baik, memastikan perawatan dan pemeliharaan yang tepat. Selain itu, SAP membantu kami dalam mengelola kewajiban keuangan dengan lebih terstruktur dan efisien. Dengan akses ke informasi yang akurat dan analisis yang kuat, kami dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan aset dan pengendalian kewajiban keuangan kami."(Wawancara Pada 21, Juni 2023).

6. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar mengukur dan melaporkan kinerja keuangan dengan menggunakan SAP

Menetapkan Indikator Kinerja Keuangan: Badan Keuangan Daerah perlu menentukan indikator kinerja keuangan yang relevan untuk mengukur kinerja keuangan secara efektif. Indikator ini dapat mencakup rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio efisiensi, serta indikator lain yang sesuai dengan tujuan dan prioritas keuangan Badan Keuangan Daerah.

Mengumpulkan Data Keuangan: Dalam SAP, Badan Keuangan Daerah mengumpulkan dan mencatat data keuangan yang diperlukan untuk mengukur

kinerja keuangan. Data tersebut meliputi informasi seperti pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. SAP memungkinkan pencatatan transaksi keuangan secara terperinci dan otomatis, sehingga data yang diperlukan untuk pengukuran kinerja tersedia secara akurat dan terkini.

Analisis dan Interpretasi Data, Data keuangan yang tercatat dalam SAP dapat dianalisis menggunakan berbagai alat analitik yang disediakan oleh SAP. Badan Keuangan Daerah dapat melakukan perhitungan rasio keuangan, tren keuangan, dan analisis lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan. Analisis ini membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan sehubungan dengan indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya.

Menyusun Laporan Kinerja Keuangan, Dengan menggunakan SAP, Badan Keuangan Daerah dapat menyusun laporan kinerja keuangan yang terstruktur dan informatif. SAP menyediakan kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan format yang diinginkan, termasuk laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan lainnya. Laporan kinerja keuangan ini mencakup hasil analisis dan interpretasi data keuangan serta memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan Badan Keuangan Daerah.

Menyajikan Laporan Kinerja Keuangan, Laporan kinerja keuangan yang telah disusun dalam SAP dapat disajikan kepada stakeholder terkait, seperti pihak internal, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Laporan ini dapat

disampaikan melalui berbagai bentuk, seperti laporan cetak, laporan elektronik, atau dashboard interaktif yang menggunakan SAP sebagai platform penyajian informasi keuangan.

Dengan menggunakan SAP, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat mengukur kinerja keuangan dengan lebih efisien dan akurat. Dalam proses ini, SAP membantu dalam pengumpulan dan pencatatan data keuangan, analisis data, penyusunan laporan kinerja keuangan, dan penyajian informasi keuangan kepada stakeholder.

Adapun Pendapat yang dikemukakan Oleh Bapak Nurdin Terkait cara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar mengukur dan melaporkan kinerja keuangan dengan menggunakan SAP dapat sebagai berikut:

"Dengan penerapan SAP, kami dapat mengukur dan melaporkan kinerja keuangan dengan lebih efektif dan efisien. SAP memberikan kemudahan dalam mengumpulkan data keuangan, menganalisis data, dan menyusun laporan kinerja yang informatif. Dengan SAP, kami dapat menghasilkan laporan keuangan yang terstruktur dan mempresentasikan informasi keuangan kepada stakeholder dengan cara yang lebih profesional dan dapat diandalkan."(wawancara Pada 21, Juni 2023)

7. Kendala atau tantangan yang dihadapi dalam penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Keterbatasan Sumber Daya, Implementasi SAP membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam mengelola sistem tersebut. Tantangan dapat timbul jika Badan Keuangan Daerah memiliki keterbatasan dalam hal jumlah atau kualitas sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola dan menjalankan SAP. Pelatihan dan pengembangan karyawan

menjadi penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang SAP dan kemampuan optimal dalam menggunakannya.

Perubahan Proses Bisnis, Penerapan SAP sering kali melibatkan perubahan dalam proses bisnis yang ada. Badan Keuangan Daerah mungkin perlu menyesuaikan prosedur dan kebiasaan yang sudah ada dengan proses baru yang diperkenalkan melalui SAP. Perubahan ini dapat menimbulkan tantangan dalam hal adaptasi dan penerimaan oleh pegawai. Diperlukan komunikasi yang efektif, pelatihan, dan dukungan manajemen yang kuat untuk membantu mengatasi kendala ini.

Integrasi dengan Sistem yang Ada, Badan Keuangan Daerah mungkin sudah memiliki sistem atau aplikasi lain yang digunakan dalam pengelolaan keuangan. Tantangan dapat muncul saat mengintegrasikan SAP dengan sistem yang sudah ada. Koordinasi dan pemetaan data antara sistem-sistem tersebut mungkin diperlukan untuk memastikan kesinambungan dan keselarasan antar sistem yang berbeda.

Biaya Implementasi dan Pemeliharaan, Penerapan SAP dapat melibatkan biaya yang signifikan, termasuk biaya perangkat lunak, pelatihan, konsultan, dan pemeliharaan. Tantangan mungkin timbul jika Badan Keuangan Daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk melaksanakan dan memelihara sistem SAP dengan baik. Perencanaan anggaran yang cermat dan pemilihan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan adalah kunci untuk mengatasi kendala ini.

Perubahan Budaya Organisasi, Penerapan SAP sering kali melibatkan perubahan budaya organisasi, seperti meningkatkan disiplin, kerjasama antar departemen, dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan data dan proses keuangan yang terstruktur. Tantangan mungkin muncul dalam mengubah pola pikir dan sikap karyawan serta memastikan adopsi yang sukses terhadap perubahan ini. Penting bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala atau tantangan yang muncul dalam penerapan SAP dengan strategi yang tepat. Dengan dukungan manajemen yang kuat, pelatihan yang memadai, dan komunikasi yang efektif, banyak kendala dapat diatasi untuk mencapai keberhasilan implementasi SAP.

Adapun Informasi yang disampaikan Oleh Bapak Muhammad Asdar terkait kendala atau tantangan dalam penerapan SAP dapat sebagai berikut:

"Kami menghadapi beberapa kendala selama penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah. Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian dalam mengelola SAP. Kami juga mengalami perubahan proses bisnis yang membutuhkan penyesuaian dan adaptasi dari pegawai. Meskipun demikian, kami berhasil mengatasi kendala ini melalui pelatihan intensif, komunikasi yang terbuka, dan dukungan manajemen yang kuat. Kami yakin bahwa kendala tersebut dapat diatasi dengan strategi yang tepat."(wawancara Pada 21 Juni, 2023)

8. Peran pengawasan dan audit dalam memastikan kepatuhan terhadap penerapan SAP

Pemeriksaan Kepatuhan, Pengawasan dan audit melibatkan pemeriksaan secara sistematis terhadap penerapan SAP guna memastikan kepatuhan terhadap aturan, kebijakan, dan prosedur yang terkait. Auditor akan memeriksa apakah

Badan Keuangan Daerah telah mengikuti proses dan pedoman yang ditetapkan dalam penerapan SAP. Hal ini membantu memastikan bahwa penggunaan SAP dilakukan sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku.

Identifikasi dan Pemantauan Risiko, Pengawasan dan audit melibatkan identifikasi dan pemantauan risiko terkait dengan penerapan SAP. Auditor akan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi penggunaan SAP secara efektif, seperti keamanan data, pemisahan tugas, atau kebijakan akses. Dengan mengidentifikasi risiko-risiko ini, langkah-langkah pengendalian dan pemantauan yang tepat dapat diterapkan untuk meminimalkan risiko dan memastikan kepatuhan terhadap penerapan SAP.

Penilaian Keefektifan Sistem dan Prosedur, Pengawasan dan audit membantu dalam penilaian keefektifan sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan SAP. Auditor akan mengevaluasi sejauh mana sistem SAP dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah prosedur yang ada sudah memadai. Hasil audit akan memberikan wawasan tentang keefektifan penerapan SAP dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.

Pemantauan Keamanan dan Integritas Data, Pengawasan dan audit berperan penting dalam memastikan keamanan dan integritas data yang terkait dengan penerapan SAP. Auditor akan memeriksa langkah-langkah keamanan yang telah diterapkan, seperti pengaturan akses pengguna dan kebijakan sandi, serta memastikan bahwa data yang diinput dan diproses dalam SAP akurat dan tidak terdistorsi. Hal ini membantu melindungi data dan menjaga integritas informasi keuangan yang terkait dengan penerapan SAP.

Rekomendasi Perbaikan dan Peningkatan: Pengawasan dan audit juga memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan terkait dengan penerapan SAP. Auditor akan mengidentifikasi kelemahan atau ketidaksesuaian dalam penerapan SAP dan memberikan rekomendasi tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas. Rekomendasi ini membantu Badan Keuangan Daerah untuk terus memperbaiki penggunaan SAP dan mencapai tingkat kepatuhan yang lebih baik.

Dengan peran pengawasan dan audit yang efektif, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat memastikan kepatuhan terhadap penerapan SAP. Melalui pemeriksaan kepatuhan, identifikasi risiko, penilaian sistem dan prosedur, pemantauan keamanan data, serta rekomendasi perbaikan, pengawasan dan audit membantu dalam menjaga integritas, kepatuhan, dan efektivitas penerapan SAP.

Adapun tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Nurdin terkait peran pengawasan dan audit dalam memastikan kepatuhan terhadap penerapan SAP dapat sebagai berikut:

"Pengawasan dan audit memainkan peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah kami. Auditor membantu kami dalam memeriksa kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang terkait dengan SAP. Selain itu, mereka juga membantu dalam identifikasi risiko, penilaian sistem dan prosedur, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Melalui pengawasan dan audit yang efektif, kami dapat memastikan keamanan data, integritas informasi, dan kepatuhan yang baik terhadap penerapan SAP."(wawancara pada 21 Juni, 2023).

9. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar melibatkan pihak-pihak terkait dalam penerapan SAP.

Manajemen internal Badan Keuangan Daerah memainkan peran penting dalam penerapan SAP. Mereka bertanggung jawab untuk mengambil keputusan strategis terkait implementasi SAP, memberikan dukungan dan arahan kepada tim proyek, dan memastikan alokasi sumber daya yang memadai. Manajemen internal juga bertanggung jawab dalam memastikan adopsi SAP yang efektif oleh seluruh anggota organisasi.

Badan Keuangan Daerah membentuk tim proyek yang terdiri dari personel internal yang bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, dan pengelolaan penerapan SAP. Tim proyek ini berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan bisnis, konfigurasi SAP sesuai dengan persyaratan, melakukan pelatihan internal, dan memastikan integrasi yang lancar dengan sistem yang ada. Mereka juga bertugas dalam memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait.

Badan Keuangan Daerah mungkin menggandeng konsultan atau vendor SAP untuk mendukung penerapan. Konsultan atau vendor ini memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam implementasi SAP dan dapat memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan dukungan dalam menghadapi tantangan yang muncul. Mereka juga dapat membantu dalam konfigurasi dan penyesuaian sistem SAP sesuai kebutuhan Badan Keuangan Daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar melibatkan departemen terkait seperti Departemen Keuangan, Departemen IT, dan Departemen SDM. Departemen-departemen ini berkontribusi dalam menyediakan data, berkolaborasi dalam pemetaan proses bisnis yang ada dengan

proses SAP, serta memastikan pemenuhan kebutuhan pengguna dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pengguna internal Badan Keuangan Daerah, termasuk staf keuangan dan administratif, turut dilibatkan dalam penerapan SAP. Mereka menerima pelatihan dan pemahaman tentang penggunaan SAP, mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan berpartisipasi dalam pengujian dan evaluasi untuk memastikan adopsi yang sukses. Pengguna internal juga dapat memberikan masukan dan umpan balik terkait pengalaman penggunaan SAP dalam aktivitas sehari-hari mereka. Melalui keterlibatan pihak-pihak terkait di atas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat memastikan kolaborasi yang efektif, dukungan yang memadai, dan adopsi yang lebih baik dalam penerapan SAP. Melibatkan pihak-pihak terkait membantu memastikan keberhasilan penerapan dan mendorong pemahaman yang lebih baik tentang SAP di seluruh organisasi.

Adapun Informasi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Irfan, terkait keterlibatan pihak-pihak terkait dalam penerapan SAP dapat sebagai berikut:

"Kami mengakui pentingnya melibatkan pihak-pihak terkait dalam penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah kami. Manajemen internal kami memberikan dukungan yang kuat, sementara tim proyek SAP bekerja sama dengan konsultan dan vendor untuk mengelola implementasi dengan sukses. Kami juga melibatkan departemen terkait dan pengguna internal dalam proses ini, sehingga kami dapat memastikan pemenuhan kebutuhan bisnis, pemahaman yang lebih baik, dan adopsi yang sukses dari SAP. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam penerapan SAP."(Wawancara Pada 21 Juni, 2023).

10. Manfaat Penerapan SAP Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

SAP menyediakan akses ke informasi keuangan yang real-time dan terkini. Hal ini memungkinkan para pengambil keputusan di Badan Keuangan Daerah untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi keuangan saat ini, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan status aset dan kewajiban. Dengan informasi yang akurat dan aktual, pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan berdasarkan data yang terpercaya.

Analisis Data yang Mendalam, SAP menyediakan kemampuan analitik yang kuat, termasuk alat pemodelan dan visualisasi data. Ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk menganalisis data keuangan secara mendalam, mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antar variabel. Dengan informasi yang disajikan dengan jelas, pengambil keputusan dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan memahami dampak keuangan dari keputusan tersebut.

Prediksi dan Proyeksi Keuangan Dengan Melalui SAP, Badan Keuangan Daerah dapat melakukan prediksi dan proyeksi keuangan untuk masa depan. SAP memungkinkan pengguna untuk melakukan simulasi dan peramalan berdasarkan data historis, mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan pendapatan, inflasi, atau perubahan kebijakan. Hal ini membantu pengambil keputusan untuk mengantisipasi dan merencanakan keputusan keuangan jangka panjang dengan lebih baik.

Integrasi Data dan Informasi, SAP mengintegrasikan berbagai modul dan fungsi ke dalam satu sistem. Hal ini memungkinkan pengambil keputusan untuk

melihat hubungan antara berbagai aspek keuangan seperti anggaran, aset, kewajiban, dan biaya. Dengan informasi yang terintegrasi, pengambil keputusan dapat melihat gambaran keseluruhan dan mempertimbangkan implikasi keuangan secara menyeluruh.

Pengurangan Kesalahan dan Risiko, SAP membantu mengurangi kesalahan dan risiko dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan proses yang terotomatisasi dan terstandarisasi, kesalahan manusia dapat diminimalkan. Selain itu, penggunaan data yang akurat dan real-time membantu mengurangi risiko kesalahan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tidak tepat atau usang. Selain Itu Keterpaduan dan Kolaborasi, Penerapan SAP memfasilitasi keterpaduan dan kolaborasi antar departemen dalam Badan Keuangan Daerah. Data dan informasi keuangan yang terintegrasi dan mudah diakses memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara tim keuangan, manajemen, dan departemen terkait lainnya. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih holistik dan koordinasi yang lebih efektif dalam mengelola keuangan Badan Keuangan Daerah.

Melalui manfaat-manfaat di atas, penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik, terinformasi, dan strategis. Adapun Informasi yang disampaikan Bapak Nurdin dalam Wawancara terkait manfaat penerapan SAP dalam pengambilan keputusan keuangan dapat sebagai berikut:

"Penerapan SAP telah memberikan manfaat yang nyata dalam pengambilan keputusan keuangan di Badan Keuangan Daerah kami. Dengan akses ke informasi keuangan yang real-time, kami dapat membuat keputusan yang lebih tepat waktu. Analisis data mendalam dan prediksi keuangan yang disediakan oleh SAP membantu kami merencanakan keputusan jangka panjang dan mengantisipasi perubahan. Integrasi data dan keterpaduan yang diberikan oleh SAP memungkinkan kami melihat gambaran keseluruhan dan mengurangi risiko kesalahan. Kami percaya bahwa penerapan SAP telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik, terinformasi, dan strategis di Badan Keuangan Daerah."

11. Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandar Dalam Memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang terkandung dalam SAP.

Penetapan Kebijakan dan Prosedur, Badan Keuangan Daerah perlu menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan penerapan SAP. Hal ini mencakup pedoman terkait keamanan data, pengelolaan akses pengguna, pemisahan tugas, serta prosedur penggunaan dan pemeliharaan SAP. Kebijakan dan prosedur ini harus disusun dengan memperhatikan standar dan persyaratan yang terkandung dalam SAP.

Pelatihan dan Pendidikan, Badan Keuangan Daerah harus memberikan pelatihan yang memadai kepada pengguna SAP tentang aturan, kebijakan, dan prosedur yang terkandung dalam sistem. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang penggunaan SAP, proses bisnis yang terkait, serta tugas dan tanggung jawab pengguna dalam menggunakan SAP dengan benar dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Pengawasan dan Monitoring, Badan Keuangan Daerah perlu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan SAP. Ini dapat dilakukan

melalui mekanisme seperti audit internal, pengawasan rutin, dan pemeriksaan berkala. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan dan prosedur yang terkandung dalam SAP diikuti dengan benar dan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Sistem Kontrol Internal, Badan Keuangan Daerah harus memperkuat sistem kontrol internal untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur dalam SAP. Hal ini mencakup pemisahan tugas yang jelas, otorisasi akses pengguna, pengendalian perubahan data, serta penerapan mekanisme validasi dan persetujuan. Sistem kontrol internal yang kuat membantu dalam mencegah kesalahan, kecurangan, dan pelanggaran aturan dalam penggunaan SAP.

Badan Keuangan Daerah harus melakukan komunikasi yang efektif dan kontinu kepada seluruh pengguna SAP tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang terkandung dalam sistem. Kesadaran akan aturan dan prosedur yang diterapkan akan membantu dalam menciptakan budaya kepatuhan dan memastikan bahwa setiap pengguna memahami tanggung jawabnya terkait dengan penggunaan SAP.

Badan Keuangan Daerah harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani pelanggaran aturan dan prosedur dalam penerapan SAP. Proses penanganan pelanggaran harus mencakup investigasi, pengaduan, dan penerapan sanksi yang sesuai. Tindakan tegas terhadap pelanggaran akan

memberikan sinyal yang kuat bahwa kepatuhan terhadap aturan dan prosedur dalam SAP adalah hal yang penting dan tidak boleh diabaikan.

Dengan langkah-langkah di atas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dapat memastikan kepatuhan yang baik terhadap aturan dan prosedur yang terkandung dalam SAP. Penetapan kebijakan, pelatihan, pengawasan, sistem kontrol internal, komunikasi yang efektif, serta penanganan pelanggaran dan sanksi yang tepat, semuanya berperan dalam memastikan kepatuhan yang konsisten terhadap aturan dan prosedur dalam penerapan SAP.

Adapun Informasi yang disampaikan Oleh Bapak Muhammad Irfan, terkait bagaimana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur dalam SAP dapat sebagai berikut:

"Kami di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar memiliki pendekatan yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur dalam SAP. Kami telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas, memberikan pelatihan yang memadai kepada pengguna, serta melakukan pengawasan dan monitoring yang rutin. Sistem kontrol internal kami juga diperkuat untuk memastikan kepatuhan yang baik". (Wawancara Pada 21, Juni 2023).

12. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar memastikan akurasi dan keandalan data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SAP

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (BKD Kabupaten Polewali Mandar) dapat menggunakan beberapa langkah untuk memastikan

akurasi dan keandalan data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SAP.

BKD Kabupaten Polewali Mandar dapat memastikan bahwa semua pengguna yang terlibat dalam penggunaan SAP menerima pelatihan yang memadai. Pelatihan ini akan membantu pengguna memahami fungsi dan fitur SAP serta proses yang diperlukan untuk memasukkan dan memvalidasi data dengan benar.

Pengendalian Akses, BKD Kabupaten Polewali Mandar dapat mengatur pengendalian akses yang ketat dalam sistem SAP. Hanya pengguna yang memiliki wewenang yang relevan yang dapat mengakses dan mengubah data keuangan. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan atau perubahan data yang tidak sah. Selain itu, Validasi Data Pada BKD Kabupaten Polewali Mandar dapat menggunakan fitur validasi data yang disediakan oleh SAP. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memeriksa dan memvalidasi data yang dimasukkan ke dalam sistem. Misalnya, jika terdapat keterkaitan antara data yang diinput, sistem SAP dapat memberikan peringatan jika terdapat kesalahan atau inkonsistensi dalam data tersebut.

Rekonsiliasi Data, BKD Kabupaten Polewali Mandar dapat melakukan rekonsiliasi data secara berkala antara sistem SAP dengan sumber data lain yang relevan, seperti bank statement atau dokumen pendukung lainnya. Dengan melakukan rekonsiliasi secara teratur, BKD dapat memastikan kecocokan dan keakuratan data yang digunakan dalam laporan keuangan. BKD Kabupaten Polewali Mandar dapat melibatkan fungsi audit internal untuk melakukan audit rutin terhadap penggunaan SAP dan data yang dimasukkan ke dalam sistem.

Audit internal akan membantu mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian dalam penggunaan SAP serta memastikan keandalan data yang digunakan.

BKD Kabupaten Polewali Mandar harus memastikan bahwa sistem SAP yang digunakan selalu diperbarui dan dipelihara dengan baik. Pembaruan sistem akan memastikan bahwa terdapat pemecahan bug dan peningkatan keamanan yang relevan. Pemeliharaan rutin juga diperlukan untuk memastikan kinerja optimal sistem dan keandalan data.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, BKD Kabupaten Polewali Mandar dapat memastikan akurasi dan keandalan data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SAP.

Adapun Informasi yang disampaikan Oleh Bapak Nurdin dalam wawancaranya Terkait dalam memastikan akurasi dan Keandalan data dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mandar Sebagai Berikut:

"Untuk memastikan akurasi dan keandalan data dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan SAP, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (BKD Kabupaten Polewali Mandar) mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif. Langkah-langkah tersebut mencakup pelatihan pengguna, pengendalian akses yang ketat, validasi data, rekonsiliasi data, audit internal, serta pemeliharaan dan pembaruan sistem. Dengan pendekatan ini, BKD Kabupaten Polewali Mandar dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam laporan keuangan terpercaya dan akurat, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan yang tepat di tingkat daerah."(Wawancara Pada 21, Juni 2023).

13. Pengaruh penerapan SAP terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

SAP memungkinkan otomatisasi sebagian besar proses keuangan, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan anggaran, dan pemrosesan pembayaran. Dengan adanya otomatisasi, waktu dan upaya yang diperlukan untuk tugas-tugas administratif dapat dikurangi secara signifikan, menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan.

SAP memiliki fitur validasi data yang kuat, yang membantu mencegah kesalahan manusia dan inkonsistensi data. Dengan adanya validasi data yang otomatis, kesalahan dalam pencatatan dan pengolahan data dapat dikurangi. Hal ini menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

SAP memungkinkan integrasi data yang lebih baik antara departemen dan unit kerja yang berbeda di BKD Kabupaten Polewali Mandar. Data keuangan dapat diakses dan dibagikan secara real-time, memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif antar tim. Hal ini membantu meningkatkan koordinasi dan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan keuangan secara keseluruhan.

SAP menyediakan alat analisis data yang kuat dan kemampuan pelaporan yang canggih. Dengan adanya fitur ini, BKD Kabupaten Polewali Mandar dapat menghasilkan laporan keuangan secara lebih cepat dan lebih akurat. Informasi keuangan yang lebih mudah diakses dan dipahami juga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat.

Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan, Dengan penerapan SAP, BKD Kabupaten Polewali Mandar dapat memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap kegiatan keuangan yang sedang berlangsung. Ini memungkinkan pengawasan dan pemantauan yang lebih efektif terhadap penggunaan anggaran, pemrosesan

pembayaran, dan pelaksanaan kebijakan keuangan. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan atau kesalahan dapat dideteksi lebih awal.

Secara keseluruhan, penerapan SAP dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan BKD Kabupaten Polewali Mandar melalui otomatisasi proses, peningkatan akurasi data, integrasi data yang lebih baik, analisis dan pelaporan yang lebih cepat, serta peningkatan pengawasan dan pemantauan. Hal ini dapat membantu BKD Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab keuangannya dengan lebih efisien dan efektif.

Adapun Informasi yang disampaikan Oleh Bapak Muhammad Irfan dalam Wawancaranya mengenai Pengaruh Penerapan SAP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (BKD Kabupaten Polewali Mandar Sebagai Berikut:

"Penerapan SAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (BKD Kabupaten Polewali Mandar). Dengan otomatisasi proses, peningkatan akurasi data, integrasi data yang lebih baik, analisis dan pelaporan yang lebih cepat, serta peningkatan pengawasan dan pemantauan, SAP membantu BKD Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya. Dalam hal ini, SAP memainkan peran penting dalam mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab keuangan, menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dan laporan keuangan yang akurat serta dapat diandalkan." (Wawancara Pada 21 Juni, 2023)

14. Indikator Dalam Mengevaluasi keberhasilan penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar

a. Efisiensi Operasional

Indikator ini mengukur efisiensi operasional yang diperoleh melalui penerapan SAP. Beberapa ukuran yang dapat digunakan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif, jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan, atau pengurangan biaya operasional yang terkait dengan kegiatan keuangan.

b. Akurasi Data

Keberhasilan penerapan SAP dapat dinilai melalui ukuran akurasi data. Dalam hal ini, dapat diukur jumlah kesalahan atau inkonsistensi data yang terjadi sebelum dan setelah penerapan SAP. Pengurangan kesalahan data menunjukkan peningkatan akurasi yang dihasilkan oleh SAP.

c. Ketersediaan Informasi

Indikator ini mengukur sejauh mana SAP meningkatkan ketersediaan informasi keuangan yang relevan. Hal ini dapat diukur dengan melihat waktu yang diperlukan untuk mengakses data keuangan, kemudahan dalam memperoleh informasi yang diperlukan, atau tingkat kepuasan pengguna terhadap aksesibilitas informasi.

d. Produktivitas

Produktivitas dapat diukur dengan melihat peningkatan efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Misalnya, dapat diukur peningkatan jumlah transaksi yang dapat ditangani dalam periode waktu tertentu, peningkatan jumlah laporan keuangan yang dihasilkan, atau peningkatan produktivitas individu atau tim yang terlibat dalam penggunaan SAP.

e. Tingkat Kepuasan Pengguna

Evaluasi keberhasilan penerapan SAP juga dapat melibatkan pengukuran tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem. Hal ini dapat dilakukan melalui survei atau wawancara dengan pengguna SAP, untuk mengetahui sejauh mana mereka merasa sistem ini memberikan manfaat, kemudahan penggunaan, dan pemenuhan kebutuhan mereka dalam pengelolaan keuangan.

f. Penghematan Biaya

Keberhasilan penerapan SAP juga dapat dinilai dari segi penghematan biaya yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dapat diukur pengurangan biaya administratif, pengurangan biaya pelatihan atau pengembangan staf, atau pengurangan biaya infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan.

Adapun Tambahan Informasi yang disampaikan Oleh Bapak Muhammad Nurdin dalam Wawancaranya Terkait, Indikator keberhasilan SAP Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Sebagai Berikut:

"Penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (BKD Kabupaten Polewali Mandar) telah berhasil, dengan mengukur dan memantau indikator-indikator seperti efisiensi operasional, akurasi data, ketersediaan informasi, produktivitas, tingkat kepuasan pengguna, dan penghematan biaya. Dalam evaluasi ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak positif yang dihasilkan oleh penerapan SAP dalam pengelolaan keuangan, membantu BKD Kabupaten Polewali Mandar mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan."

15. Perubahan Setelah penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (BKD Kabupaten Polewali Mandar)

Proses Otomatisasi, Dengan penerapan SAP Proses penyusunan laporan keuangan dapat mengalami otomatisasi yang signifikan. Data yang diperlukan untuk laporan keuangan dapat diambil secara otomatis dari berbagai modul SAP yang terintegrasi, seperti modul akuntansi, pengelolaan anggaran, dan pengelolaan aset. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk melakukan pencatatan manual dan mempercepat proses penyusunan laporan.

Konsistensi dan Keseragaman, Penerapan SAP memungkinkan penggunaan template laporan keuangan standar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan BKD Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini membantu menciptakan konsistensi dan keseragaman dalam format dan struktur laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan menggunakan template yang sama, laporan keuangan dapat lebih mudah dibandingkan dari waktu ke waktu, memudahkan analisis dan evaluasi.

Integrasi Data yang Lebih Baik, SAP memungkinkan integrasi data yang lebih baik antara berbagai modul dan sistem terkait dalam BKD Kabupaten Polewali Mandar. Ini berarti data yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan dapat diambil langsung dari sumber data yang valid dan terverifikasi di SAP. Integrasi data yang lebih baik juga mengurangi risiko kesalahan dan inkonsistensi dalam laporan keuangan.

Peningkatan Akurasi dan Keandalan, Dengan adanya validasi data dan kontrol yang ketat dalam SAP, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Validasi data otomatis membantu mencegah kesalahan manusia dan memastikan bahwa data yang digunakan dalam laporan

keuangan telah melewati proses verifikasi yang tepat. Hal ini meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.

Efisiensi dan Kecepatan, Penerapan SAP memungkinkan proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efisien dan cepat. Data dapat diakses dengan mudah dan langsung dari sistem, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Proses otomatisasi juga mengurangi tugas-tugas administratif yang repetitif, membebaskan waktu dan sumber daya untuk kegiatan lain yang bernilai tambah.

Kemudahan Pelaporan, SAP menyediakan alat analisis dan pelaporan yang canggih, memungkinkan pembuatan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan terperinci. Pengguna dapat menghasilkan laporan keuangan dengan lebih mudah dan cepat menggunakan fitur-fitur yang disediakan, seperti filter data, pembuatan grafik, dan analisis data yang mendalam. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman tentang kondisi keuangan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Secara keseluruhan, penerapan SAP di BKD Kabupaten Polewali Mandar dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk proses otomatisasi, konsistensi dan keseragaman, integrasi data yang lebih baik, peningkatan akurasi dan keandalan, efisiensi dan kecepatan, serta kemudahan dalam pelaporan.

"Setelah penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (BKD Kabupaten Polewali Mandar), terjadi perubahan signifikan dalam penyusunan laporan keuangan. Proses otomatisasi meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam penyusunan laporan, sementara konsistensi dan keseragaman dalam format laporan menciptakan perbandingan yang lebih mudah. Integrasi data yang lebih baik memastikan ketersediaan informasi yang valid dan terverifikasi. Selain itu, akurasi dan keandalan laporan ditingkatkan melalui validasi

data yang ketat. Dengan adanya alat analisis dan pelaporan yang canggih, pemahaman tentang kondisi keuangan ditingkatkan. Secara keseluruhan, penerapan SAP memperoleh efisiensi yang tinggi, meningkatkan akurasi, dan menyediakan pemahaman yang lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan di BKD Kabupaten Polewali Mandar."(Wawancara Pada Tanggal 21 Juni, 2023)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah terlaksana dengan baik. SAP memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan terintegrasi, memastikan penggunaan standar dan prosedur yang konsisten dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Penerapan SAP berdampak positif terhadap transparansi laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dengan adanya standar dan prosedur yang terintegrasi, SAP membantu memastikan konsistensi, akurasi, dan keandalan data dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan transparansi informasi keuangan kepada pemangku kepentingan.
3. Penerapan SAP juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Melalui standar dan prosedur yang terintegrasi, SAP memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
4. SAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsistensi dan keseragaman laporan keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dengan format laporan yang dapat disesuaikan dan penggunaan data yang terintegrasi, SAP membantu menciptakan laporan

keuangan yang seragam, mudah dibandingkan, dan memudahkan analisis terhadap kinerja keuangan.

5. Penerapan SAP memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengelolaan aset dan kewajiban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. SAP memungkinkan pencatatan dan pemantauan yang terintegrasi terhadap aset dan kewajiban, serta penggunaan data yang akurat dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan keuangan.
6. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar mengukur dan melaporkan kinerja keuangan dengan menggunakan SAP melalui analisis data yang terdokumentasi secara sistematis. SAP menyediakan laporan keuangan yang dapat disesuaikan dengan indikator dan ukuran yang relevan untuk evaluasi kinerja keuangan.
7. Dalam penerapan SAP, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar mungkin menghadapi beberapa kendala atau tantangan, seperti pelatihan pengguna, kesesuaian perangkat keras dan perangkat lunak, serta pemantauan dan pemeliharaan sistem secara berkala. Namun, tantangan ini dapat diatasi dengan dukungan yang tepat dan komitmen dari pihak terkait.
8. Pengawasan dan audit memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap penerapan SAP. Melalui pengawasan dan audit, dapat dilakukan penilaian terhadap kepatuhan pengguna SAP terhadap aturan

dan prosedur yang terkandung dalam SAP, serta identifikasi dan penyelesaian potensi masalah atau pelanggaran.

9. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar melibatkan pihak-pihak terkait, seperti auditor eksternal dan konsultan SAP, dalam penerapan SAP. Melalui kerjasama dengan pihak-pihak tersebut, dapat diperoleh dukungan dan pemahaman yang lebih baik dalam implementasi dan penggunaan SAP.
10. Penerapan SAP memberikan manfaat yang nyata dalam pengambilan keputusan keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dengan adanya data yang terintegrasi, format laporan yang konsisten, serta penggunaan standar dan prosedur yang terstruktur, pengambilan keputusan dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.
11. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang terkandung dalam SAP melalui penerapan kontrol internal yang efektif. Pengguna SAP perlu mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam SAP serta melaksanakan pengawasan internal yang tepat untuk memastikan kepatuhan.
12. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar memastikan akurasi dan keandalan data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SAP melalui validasi otomatis yang disediakan oleh sistem. Pemantauan dan pemeliharaan sistem secara berkala juga

diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas data yang digunakan.

13. Penerapan SAP berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dengan adanya standar dan prosedur yang terintegrasi, penggunaan data yang akurat, serta format laporan yang konsisten, proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
14. Indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan SAP di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar meliputi tingkat kepatuhan terhadap aturan dan prosedur SAP, akurasi dan keandalan laporan keuangan, waktu respon dalam pengambilan keputusan keuangan, serta efisiensi pengelolaan keuangan.
15. Setelah penerapan SAP, terjadi perubahan dalam penyusunan laporan keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, seperti peningkatan konsistensi dan keseragaman format laporan, penggunaan data yang terintegrasi, serta peningkatan akurasi dan keandalan laporan keuangan.
16. Penerapan SAP membantu dalam meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Melalui standar dan prosedur yang terintegrasi, penggunaan data yang akurat dalam laporan keuangan, serta peningkatan transparansi informasi keuangan kepada pemangku kepentingan, SAP

berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.



B. Saran

1. Melakukan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap penerapan SAP untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan sistem. Hal ini melibatkan pelatihan dan pemeliharaan yang tepat untuk pengguna SAP, serta peninjauan terhadap kesesuaian perangkat keras dan perangkat lunak dengan persyaratan SAP.
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan pihak eksternal, seperti auditor eksternal dan konsultan SAP. Kolaborasi yang baik dengan pihak terkait dapat memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih baik dalam implementasi dan penggunaan SAP.
3. Mengoptimalkan pengawasan dan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang terkandung dalam SAP. Pengawasan yang efektif akan membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah atau pelanggaran yang mungkin terjadi.
4. Terus menerapkan kontrol internal yang efektif guna memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur SAP. Pengguna SAP perlu mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan, serta melaksanakan pengawasan internal yang tepat dalam setiap tahapan penyusunan laporan keuangan.
5. Menggunakan indikator dan ukuran yang relevan untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan SAP. Evaluasi kinerja keuangan dapat didasarkan pada tingkat kepatuhan terhadap aturan dan prosedur SAP, akurasi dan

keandalan laporan keuangan, waktu respon dalam pengambilan keputusan keuangan, serta efisiensi pengelolaan keuangan.

6. Melakukan pemantauan terhadap perubahan yang terjadi setelah penerapan SAP, seperti peningkatan konsistensi dan keseragaman format laporan, penggunaan data yang terintegrasi, serta peningkatan akurasi dan keandalan laporan keuangan. Evaluasi ini akan membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan penerapan SAP dan memberikan masukan untuk perbaikan dan peningkatan ke depan.
7. Mengkomunikasikan manfaat yang diperoleh dari penerapan SAP kepada semua pemangku kepentingan. Menyampaikan informasi mengenai peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan dapat memperkuat kepercayaan dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

DAFTAR PUSTAKA

- Cîrstea, A. (2014). *The Need for Public Sector Consolidated Financial Statements*. *Procedia Economics and Finance*, 15, 1289–1296. doi:10.1016/s2212-5671(14)00590-5
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT. Indeks
- Hanifah, Hani Siti . Eliya Fatma Harahap, Intan Noviyanti Hidayat. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan E-Jurnal Akuntansi. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia.
- Harahap, Sofyan Syafari, 2013, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kieso, Donald E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2012. *Intermediate Accounting*. 14th edition. USA: Jhon Willey & Sons, Inc
- Lauma, Enda Baisida, Jenny Morasa, Lintje Kalangi. 2016. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolang Mongondow*. *Ejournal Universitas Mercubuana*.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Munawir, S. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugraheni P dan Subaweh I, (2008). “ Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan “. *Jurnal Ekonomi Bisnis* No.1 Vol 13, April 2008.
- Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas Widuri, 2014. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara*. *Tax and Accounting Reviuw*, 4(2), 1-15
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- _____ 166/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Barang Milik Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah.

- _____ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah
- _____ 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- _____ 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____ 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (Revisi 1998) Penyajian Laporan Keuangan.
- _____ 1 (Revisi 2009) Penyajian Laporan Keuangan.
- _____ 16 (Revisi 2011) Aktiva Tetap. Ramadhan, Hudan Akbar. 2013. Analisis Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 (5) tentang standar akuntansi pemerintah.
- Rizaldy, Mohammad Fachmi. 2016. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI (Accrual Basis) Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Malang:Universitas Brawijaya.
- Sari, Rizki Puspita. 2018. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih. tesis. Sriwijaya University.
- Setiadi, Doddy. 2008. Aset Merupakan Komponen Laporan Keuangan Yang Besar Pengaruhnya Terhadap Opini.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah. Konsep dan Aplikasi (sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan). Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Eko Hery. 2012. Kapitalisasi Aset Tetap: Solusi Yang Belum Tergarap Optimal.
- Yuwono, Sony., Dwi Cahyo Utomo, Suhaery Zein, dan Azrafiany A. R. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya. Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah. Malang: Banyumedia Publishing.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A.1367/FEB/UNIBOS/VI/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian & Pengambilan Data

Kepada Yth.
Bupati Polewali Mandar
Cq. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Polman
 Di-
 Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : St. Nur Fadilah Utami
 NIM : 4519013073
 Program Studi : Akuntansi
 No. Telp/Hp : 085298955114
 Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 22 Juni 2023

~~Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis~~



Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., MM
 NIDN. 09.2412.680

Tembusan
 1. Rektor Universitas Bosowa
 2. Arsip

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian





Lampiran 3 Laporan Neraca 2020 – 2019



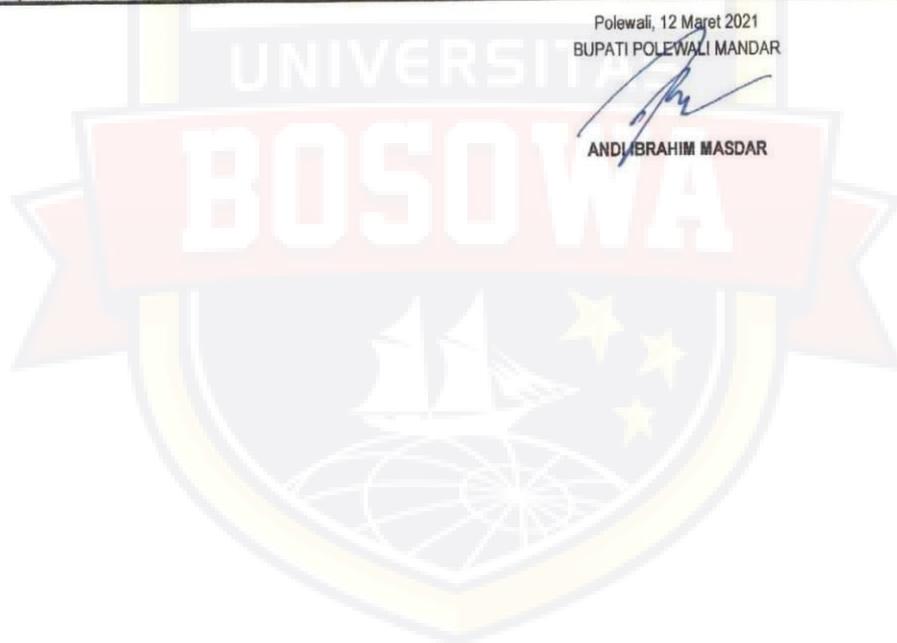
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No.	Uraian	Catatan	2020	2019
1	2	3	4	5
1	ASET	7.5.1.1		
	ASET LANCAR	7.5.1.1 a		
	Kas di Kas Daerah	7.5.1.1 a.1)	41.342.494.400,04	44.615.164.259,27
	Setara Kas (Deposito)		-	-
	Kas di BLUD	7.5.1.1 a.2)	2.719.130.223,56	6.774.027.651,56
	Kas Di Bendahara FKTP	7.5.1.1 a.3)	1.279.035.291,00	1.215.029.002,00
	Kas Di Bendahara BOS		-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.1.1 a.4)	820.000,00	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.1.1 a.5)	1.486.800,00	7.679.363,00
	Kas Lainnya	7.5.1.1 a.6)	6.108.501.979,00	7.159.453.434,00
	Piutang Pajak Daerah	7.5.1.1 a.7)	9.946.590.113,49	9.748.847.315,93
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(5.978.367.399,72)	(5.083.818.709,73)
	Piutang Retribusi	7.5.1.1 a.8)	1.051.838.750,00	2.002.120.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi		(9.510.000,00)	(4.755.000,00)
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	7.5.1.1 a.9)	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.1.1 a.10)	7.785.234.687,00	8.226.697.575,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1 a.11)	47.415.903.328,14	44.182.530.300,06
	Penyisihan Piutang Lain2 PAD yang Sah		(11.596.477.446,39)	(10.154.781.515,13)
	Piutang Lainnya	7.5.1.1 a.12)	5.370.321.550,00	5.380.321.550,00
	Penyisihan Piutang		(5.065.000.000,00)	(5.045.500.000,00)
	Piutang Dana Alokasi Umum	7.5.1.1 a.13)	-	-
	Beban Dibayar Dimuka	7.5.1.1 a.14)	-	1.719.648.187,67
	Persediaan	7.5.1.1 a.15)	14.878.048.821,12	18.587.896.223,02
	Jumlah Aset Lancar		115.248.051.097,24	129.310.559.636,65
	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.1.1 b		
	Investasi Nonpermanen		-	-
	Investasi dalam Dana Bergulir	7.5.1.1 b.1)	9.739.642.937,00	9.739.642.937,00
	Penyisihan Dana Bergulir	7.5.1.1 b.2)	(9.739.642.937,00)	(9.739.642.937,00)
	Jumlah Investasi Nonpermanen		-	-
	Investasi Permanen	7.5.1.1 b.2)		
	Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan		10.399.000.000,00	10.399.000.000,00
	Penyertaan Modal Kepada BUMD		16.241.343.186,82	15.541.990.121,61
	Jumlah Investasi Permanen		26.640.343.186,82	25.940.990.121,61
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		26.640.343.186,82	25.940.990.121,61
	ASET TETAP	7.5.1.1 c		
	Tanah	7.5.1.1 c.1)	346.581.965.387,50	345.355.663.537,50
	Peralatan dan Mesin	7.5.1.1 c.2)	456.791.555.183,54	354.924.957.735,54
	Gedung dan Bangunan	7.5.1.1 c.3)	1.091.798.979.119,32	979.233.145.135,29
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.1.1 c.4)	997.917.847.148,44	920.986.732.909,44
	Aset Tetap Lainnya	7.5.1.1 c.5)	9.091.708.901,58	9.055.910.710,01
	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.1.1 c.6)	25.923.540.871,00	58.378.619.426,00
	Akumulasi Penyusutan	7.5.1.1 c.7)	(821.977.284.967,35)	(696.116.712.322,09)
	Jumlah Aset Tetap		2.106.128.311.644,03	1.971.818.317.131,69
	ASET LAINNYA	7.5.1.1. d		
	Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.1.1 d.1)	12.484.749.586,00	13.369.633.978,00
	Aset Tak Berwujud	7.5.1.1 d.2)	2.365.020.500,00	2.342.520.500,00
	Amortisasi ATB	7.5.1.1 d.3)	(1.892.528.568,33)	(1.728.634.795,00)
	Aset Lain-lain	7.5.1.1 d.4)	84.699.284.492,37	107.167.571.492,65
	Jumlah Aset Lainnya		97.656.526.010,04	121.153.091.175,65
	JUMLAH ASET		2.345.673.231.938,13	2.248.222.958.065,60

No.	Uraian	Catatan	2020	2019
1	2	3	4	5
	KEWAJIBAN	7.5.1.2		
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.1.2.a		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.5.1.2.a.1)	1.486.800,00	7.679.363,00
	Utang Bunga			
	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat			
	Bagian Lancar Utang Pemerintah Daerah Lainnya			
	Pendapatan diterima dimuka			
	Utang Belanja	7.5.1.2.a.2)	36.025.162.001,00	32.856.480.975,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.1.2.a.3)	4.946.865.640,48	7.541.658.816,48
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		40.973.514.441,48	40.405.819.154,48
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
	Utang Pemerintah Dalam Negeri		-	-
	Utang Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN		40.973.514.441,48	40.405.819.154,48
	JUMLAH EKUITAS AWAL			
	JUMLAH EKUITAS		2.304.699.717.496,65	1.911.161.539.723,58
	Jumlah Ekuitas	7.5.1.3	2.304.699.717.496,65	1.911.161.539.723,58
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.345.673.231.938,13	1.951.567.358.878,06

Polewali, 12 Maret 2021
BUPATI POLEWALI MANDAR


ANDIBRAHIM MASDAR



Lampiran 4 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 2020 -2019

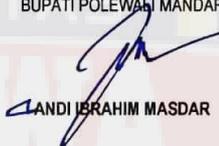


LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
31 DESEMBER 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

No	URAIAN	2020	2019
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	60.064.907.559,83	28.107.979.724,11
2	Penggunaan Sal Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	60.064.907.559,83	28.107.979.724,11
3	Sub Total (1-2)	-	-
4	Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	51.750.092.693,60	60.064.907.559,83
5	Sub Total (3+4)	51.750.092.693,60	60.064.907.559,83
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+7+8)	51.750.092.693,60	60.064.907.559,83

Polewali, 12 Maret 2021
BUPATI POLEWALI MANDAR


LANDI IBRAHIM MASDAR

Lampiran 5 Laporan Operasional 2020



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	2020	2019
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL		7.5.4		
1	PENDAPATAN - LO	7.5.4.a	1.384.514.241.131,62	1.453.992.949.008,71
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.5.4.a.1	213.997.122.727,62	167.918.863.612,36
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.5.4.a.1.a)	25.201.786.203,02	24.818.670.398,66
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.5.4.a.1.b)	10.766.515.489,00	11.974.023.554,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.5.4.a.1.c)	4.242.240.128,21	4.090.634.137,35
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.5.4.a.1.d)	173.786.580.907,39	127.035.535.522,35
7	PENDAPATAN TRANSFER - LO	7.5.4.a.2	1.064.377.824.294,00	1.199.711.161.580,35
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	7.5.4.a.2.a)	1.012.302.581.907,00	1.121.916.283.452,00
9	Bagi Hasil Pajak - LO		8.398.362.893,00	7.646.286.673,00
10	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO		861.880.659,00	624.219.381,00
11	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO		671.333.866.000,00	735.369.588.000,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO		331.708.472.355,00	378.276.189.398,00
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	7.5.4.a.2.b)	8.222.783.000,00	24.603.346.000,00
14	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	7.5.4.a.2.c)	38.852.459.387,00	37.691.532.128,35
15	Bantuan Keuangan - LO	7.5.4.a.2.d)	5.000.000.000,00	15.500.000.000,00
16	Dana Alokasi Desa - LO	7.5.4.a.2.e)		0,00
17	Dana Insentif Daerah - LO	7.5.4.a.2.f)		0,00
18	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	7.5.4.a.2	106.139.294.110,00	86.362.923.816,00
19	Pendapatan Hibah - LO	7.5.4.a.3.a)	106.139.294.110,00	86.362.923.816,00
20	Pendapatan Lainnya - LO	7.5.4.a.3.b)	0,00	0,00
21	BEBAN	7.5.4.b	1.231.714.492.018,84	1.194.831.167.842,84
22	BEBAN OPERASI - LO	7.5.4.b.1	1.161.929.037.779,84	1.116.587.539.431,84
23	Beban Pegawai - LO	7.5.4.b.1.a)	606.654.493.965,00	610.967.936.114,00
24	Beban Persediaan - LO	7.5.4.b.1.b)	80.017.254.737,90	53.281.146.330,89
25	Beban Jasa - LO	7.5.4.b.1.c)	255.929.494.343,10	222.817.198.302,55
26	Beban Pemeliharaan - LO	7.5.4.b.1.d)	8.118.638.199,00	29.344.619.802,39
27	Beban Perjalanan Dinas - LO	7.5.4.b.1.e)	38.260.765.126,00	51.183.350.345,00
28	Beban Bunga - LO	7.5.4.b.1.f)	0,00	0,00
29	Beban Hibah - LO	7.5.4.b.1.g)	40.417.727.590,00	34.727.737.522,00
30	Beban Bantuan Sosial - LO	7.5.4.b.1.h)	4.142.957.779,00	5.006.846.900,00
31	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	7.5.4.b.1.i)	126.026.466.418,59	106.399.744.759,69
32	Beban Penyisihan Piutang - LO	7.5.4.b.1.j)	2.361.239.621,25	2.552.261.655,33
33	Beban Lain-lain - LO	7.5.4.b.1.k)		306.697.700,00
34	BEBAN TRANSFER	7.5.4.b.2	69.785.454.239,00	78.243.628.411,00
35	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - LO	7.5.4.b.2.a)		1.879.456.891,00
36	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LO	7.5.4.b.2.b)	68.881.742.639,00	75.475.922.400,00
37	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - LO	7.5.4.b.2.c)	903.711.600,00	888.249.120,00
38	SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI - LO	7.5.4.c	152.799.749.112,78	259.161.781.165,87
39	SUPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.d	-53.718.746.275,25	-8.816.168.275,00
40	SUPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.d.1	0,00	0,00
41	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO			
42	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00
43	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00

NO.	URAIAN	Catatan	2020	2019
1	2	3	4	5
44	DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.d.2	53.718.746.275,25	8.816.168.275,00
45	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		3.477.046.249,67	0,00
46	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00
47	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		50.241.700.025,58	8.816.168.275,00
48	SUPPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.d	-53.718.746.275,25	-8.816.168.275,00
	SUPPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA LUAR		99.081.002.837,53	250.345.812.890,87
49	POS LUAR BIASA	7.5.4.b.a	0,00	-54.000,00
50	Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00
51	Beban Luar Biasa - LO		0,00	54.000,00
52	SURPLUS (DEFISIT) - LO	7.5.4.f	99.081.002.837,53	250.345.558.890,87

Polewali, 12 Maret 2021
BUPATI POLEWALI MANDAR


ANDI IBRAHIM MASDAR



Lampiran 6 Laporan Perubahan Ekuitas


PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	2.207.817.138.911,12	1.911.161.539.723,58
Surplus Defisit Laporan Operasional (LO)	99.081.002.837,53	250.345.558.890,87
RK PPKD		
Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan		
Koreksi Revaluasi Aset tetap	(2.198.424.252,00)	47.857.839.045,08
Koreksi Kesalahan Aset Tetap Lainnya		(1.956.396.895,83)
Koreksi Kesalahan Utang Belanja		408.756.104,00
Koreksi Kesalahan Utang Jangka Pendek Lainnya		(157.956,58)
EKUITAS AKHIR	2.304.699.717.496,65	2.207.817.138.911,12

Polewali, 12 Maret 2021
 BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR

Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO.REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2020	LEBIHKURANG	(%)	REALISASI TAHUN 2019
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN - LRA	1.478.292.112.702,03	1.510.703.225.675,77	(32.411.112.973,74)	102,19	1.605.308.497.517,72
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	184.390.655.651,14	211.985.061.141,77	(27.594.405.490,63)	114,97	173.713.736.017,38
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	23.701.540.000,00	24.377.042.874,46	(675.502.874,46)	102,85	24.370.100.225,58
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	13.998.088.000,00	11.716.796.739,00	2.281.291.261,00	83,70	12.249.690.554,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.297.813.372,00	3.542.887.063,00	754.926.309,00	82,43	4.019.024.496,35
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	142.393.214.279,14	172.348.334.465,31	(29.955.120.186,17)	121,04	133.074.920.741,45
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.221.273.424.393,89	1.226.152.350.182,00	(4.878.925.788,11)	100,40	1.370.062.935.500,34
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.015.570.932.432,00	1.012.302.581.907,00	3.268.350.525,00	99,68	1.130.429.457.452,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	10.861.214.196,00	8.398.362.893,00	2.462.851.303,00	77,32	7.646.286.673,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.777.974.236,00	861.880.659,00	916.093.577,00	48,48	624.219.381,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	676.178.238.000,00	671.333.866.000,00	4.844.372.000,00	99,28	743.882.762.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	326.753.506.000,00	331.708.472.355,00	(4.954.966.355,00)	101,52	378.276.189.398,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	169.555.846.000,00	169.555.846.000,00	0,00	100,00	186.298.160.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	169.555.846.000,00	169.555.846.000,00	0,00	100,00	186.298.160.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	31.146.645.961,89	39.293.922.275,00	(8.147.276.313,11)	126,16	37.835.318.048,34
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	31.146.645.961,89	39.293.922.275,00	(8.147.276.313,11)	126,16	37.835.318.048,34
4.2.4	Bantuan Keuangan LRA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00	15.500.000.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00	15.500.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	72.628.032.657,00	72.565.814.352,00	62.218.305,00	99,91	61.531.826.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	72.628.032.657,00	72.565.814.352,00	62.218.305,00	99,91	61.531.826.000,00
5	BELANJA	1.303.674.733.938,66	1.287.899.523.303,00	15.775.210.635,66	98,79	1.333.413.127.271,00
5.1	BELANJA OPERASI	981.777.151.148,31	964.538.677.346,00	17.238.473.803,31	98,24	983.170.378.108,00
5.1.1	Belanja Pegawai	616.272.882.971,56	601.699.768.133,00	14.573.114.838,56	97,64	613.429.120.954,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	342.672.750.577,75	340.807.449.146,00	1.865.301.431,75	99,46	338.520.260.254,00
5.1.5	Belanja Hibah	20.811.517.800,00	20.131.250.000,00	680.267.800,00	96,73	26.214.150.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.020.000.000,00	1.900.210.067,00	119.789.933,00	94,07	5.006.846.900,00
5.2	BELANJA MODAL	298.397.582.789,35	302.905.186.325,00	(4.507.603.535,65)	101,51	350.242.895.163,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.578.411.682,00	1.426.822.223,00	151.589.459,00	90,40	15.182.580.830,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.328.738.840,80	92.119.110.371,00	(16.790.371.530,20)	122,29	47.911.334.963,00

NO.REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2020	LEBIHKURANG	(%)	REALISASI TAHUN 2019
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.931.707.783,00	120.929.203.159,00	7.002.504.624,00	94,53	129.228.855.183,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.361.677.997,55	78.151.129.816,00	5.210.548.181,55	93,75	136.780.811.688,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.197.046.486,00	10.278.920.756,00	(81.874.270,00)	100,80	21.139.112.499,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	23.500.000.000,00	20.455.659.632,00	3.044.340.368,00	87,05	54.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	23.500.000.000,00	20.455.659.632,00	3.044.340.368,00	87,05	54.000,00
6	TRANSFER	234.682.286.323,20	231.118.517.239,00	3.563.769.084,20	98,48	239.938.442.411,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	3.556.962.800,00	0,00	3.556.962.800,00	0,00	1.879.456.891,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.556.962.800,00	0,00	3.556.962.800,00	0,00	1.879.456.891,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	231.125.323.523,20	231.118.517.239,00	6.806.284,20	100,00	238.058.985.520,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	230.214.805.643,20	230.214.805.639,00	4,20	100,00	237.170.736.400,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	910.517.880,00	903.711.600,00	6.806.280,00	99,25	888.249.120,00
	SURPLUS / DEFISIT	(60.064.907.559,83)	(8.314.814.866,23)	(51.750.092.693,60)	100	31.956.927.835,72
7	PEMBIAYAAN					
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.064.907.559,83	60.064.907.559,83	0,00	100,00	28.107.979.724,11
7.1.1	Penggunaan SILPA	60.064.907.559,83	60.064.907.559,83	0,00	100,00	28.107.979.724,11
	PEMBIAYAAN NETTO	60.064.907.559,83	60.064.907.559,83	0,00	0,00	28.107.979.724,11
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0,00)	51.750.092.693,60		0,00	60.064.907.559,83

Polewali, 12 Maret 2021
BUPATI POLEWALI MANDAR

LANTJI IBRAHIM MASDAR

Lampiran 8 Laporan Arus Kas


KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2020	2019
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.6.a		
2	Arus Masuk Kas :	7.5.6.a.1)		
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA		24.377.042.874,46	24.370.100.225,58
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		11.716.796.739,00	12.249.690.554,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		3.542.887.063,00	4.019.024.496,35
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		171.881.748.380,31	133.034.120.741,45
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		1.012.302.581.907,00	1.130.429.457.452,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		169.555.846.000,00	186.298.160.000,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		39.293.922.275,00	37.835.318.048,34
10	Bantuan Keuangan - LRA		5.000.000.000,00	15.500.000.000,00
11	Pendapatan Hibah - LRA		72.565.814.352,00	61.531.826.000,00
12	Jumlah Arus Kas Masuk	7.5.6.a.2)	1.510.236.639.590,77	1.605.267.697.517,72
13	Arus Kas Keluar			
14	Belanja Pegawai		601.699.768.133,00	613.429.120.954,00
15	Belanja Barang dan Jasa		340.807.449.146,00	338.520.260.254,00
16	Belanja Hibah		20.131.250.000,00	26.214.150.000,00
17	Belanja Bantuan Sosial		1.900.210.067,00	5.006.846.900,00
18	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan		0,00	0,00
19	Belanja Tek Terduga		20.455.659.632,00	54.000,00
20	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	1.879.456.891,00
21	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		230.214.805.639,00	237.170.736.400,00
22	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		903.711.600,00	888.249.120,00
23	Jumlah Arus Keluar Kas		1.216.112.854.217,00	1.223.108.874.519,00
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.5.6.a.3)	294.123.785.373,77	382.158.822.998,72
25	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.6.b		
26	Arus Masuk Kas	7.5.6.b.1)		
27	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		310.484.076,00	40.800.000,00
28	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		156.102.009,00	
29	Jumlah Arus Masuk Kas		466.586.085,00	40.800.000,00
30	Arus Keluar Kas	7.5.6.b.2)		
31	Belanja Modal Tanah		1.426.822.223,00	15.182.580.830,00
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		92.119.110.371,00	47.911.334.963,00
33	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		120.929.203.159,00	129.228.855.183,00
34	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		78.151.129.816,00	136.780.811.688,00
35	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		10.278.920.756,00	21.139.112.499,00
36	Jumlah Arus Keluar Kas		302.905.186.325,00	350.242.695.163,00
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	7.5.6.b.3)	(302.438.600.240,00)	(350.201.895.163,00)
38	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.6.d		
39	Arus Masuk Kas	7.5.6.d.1)		
40	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		85.366.548.697,80	82.420.967.850,80
41				
42	Jumlah Arus Masuk Kas		85.366.548.697,80	82.420.967.850,80
43	Arus Keluar Kas	7.5.6.d.2)		
44	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		85.378.316.397,80	82.784.376.505,36
45	Lain lain		1.003.506.000,00	0,00
46	Jumlah Arus Keluar Kas		86.381.822.397,80	82.784.376.505,36
47	Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris	7.5.6.d.3)	(1.015.273.700,00)	(363.408.654,56)

NO	URAIAN	Catatan	2020	2019
1	2	3	4	5
48	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Sbb:	7.5.6.e	(9.330.088.566,23)	31.593.519.181,16
49	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.6.f	59.771.353.709,83	28.163.746.191,67
50	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.6.g	50.441.265.143,60	59.757.265.372,83
51	Saldo Akhir Kas Lainnya	7.5.6.h	1.007.383.550,00	14.088.337,00
52	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.6.i	820.000,00	
53	Saldo Akhir Kas	7.5.6.j	51.449.468.693,60	59.771.353.709,83

Polewali, 12 Maret 2021
BUPATI POLEWALI MANDAR


ANDI BRAHIM MASDAR



Lampiran 9 Laporan Arus Kas

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.6.a		
2	Arus Masuk Kas :	7.5.6.a.1)		
3	Pajak Daerah		25.645.071.245,90	24.377.042.874,46
4	Retribusi Daerah		19.298.257.431,00	11.716.796.739,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.488.099.115,00	3.542.887.063,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah		211.633.099.239,70	171.881.748.380,31
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.154.508.317.303,00	1.181.858.427.907,00
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah		40.888.299.641,00	39.293.922.275,00
10	Bantuan Keuangan		0,00	5.000.000.000,00
11	Pendapatan Hibah		60.954.972.798,00	72.561.305.986,00
12	Jumlah Arus Kas Masuk	7.5.6.a.2)	1.516.416.116.773,60	1.510.232.131.224,77
13	Arus Kas Keluar			
14	Belanja Pegawai		573.232.463.477,00	601.699.768.133,00
15	Belanja Barang dan Jasa		431.240.129.328,00	340.807.449.146,00
16	Belanja Hibah		38.916.629.738,66	20.131.250.000,00
17	Belanja Bantuan Sosial		1.362.747.712,00	1.900.210.067,00
19	Belanja Tak Terduga		2.844.016.117,00	21.459.165.632,00
20	Belanja Bagi Hasil		2.254.773.433,00	0,00
21	Belanja Bantuan Keuangan		230.132.105.206,00	231.118.517.239,00
23	Jumlah Arus Kas Keluar		1.279.982.865.011,66	1.217.116.360.217,00
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.5.6.a.3)	236.433.251.761,94	293.115.771.007,77
25	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.6.b		
26	Arus Masuk Kas	7.5.6.b.1)		
27	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		558.891.988,00	310.484.076,00
28	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		81.414.000,00	156.102.009,00
29	Jumlah Arus Masuk Kas		640.305.988,00	466.586.085,00
30	Arus Keluar Kas	7.5.6.b.2)		
31	Belanja Modal Tanah		1.366.737.628,00	1.426.822.223,00
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		60.149.712.867,00	92.119.110.371,00
33	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		81.767.134.480,00	120.929.203.159,00
34	Belanja Modal Jalan, Iriqasi dan Jaringan		68.152.195.927,00	78.151.129.816,00
35	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3.302.845.560,00	10.278.920.756,00
36	Jumlah Arus Keluar Kas		214.738.626.462,00	302.905.186.325,00
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	7.5.6.b.3)	(214.098.320.474,00)	(302.438.600.240,00)
38	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.6.d		
39	Arus Masuk Kas	7.5.6.d.1)		
40	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		85.635.313.667,47	85.366.548.697,80
41	Jumlah Arus Masuk Kas		85.635.313.667,47	85.366.548.697,80
42	Arus Keluar Kas	7.5.6.d.2)		
43	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		85.625.313.667,47	85.378.316.397,80
44	Lain lain		1.137.151.779,20	0,00
45	Jumlah Arus Keluar Kas		86.762.465.446,67	85.378.316.397,80
46	Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris	7.5.6.d.3)	(1.127.151.779,20)	(11.767.700,00)
47	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Sbb:	7.5.6.e	21.207.779.508,74	(9.334.596.932,23)
48	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.6.f	51.574.728.556,80	59.771.353.709,83
49	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.6.g	72.782.508.065,54	50.436.756.777,60
50	Saldo Akhir Kas Lainnya	7.5.6.h	111.176.324,40	1.137.151.779,20
51	Saldo Akhir Kas di Bendahara	7.5.6.i	17.026.000,00	820.000,00
52	Saldo Akhir Kas	7.5.6.j	72.910.710.389,94	51.574.728.556,80

 **BUPATI POLEWALI MANDAR**

 **H. Andi Ibrahim Masdar**

Lampiran 10 Laporan Perubahan Saldo 2021 – 2020



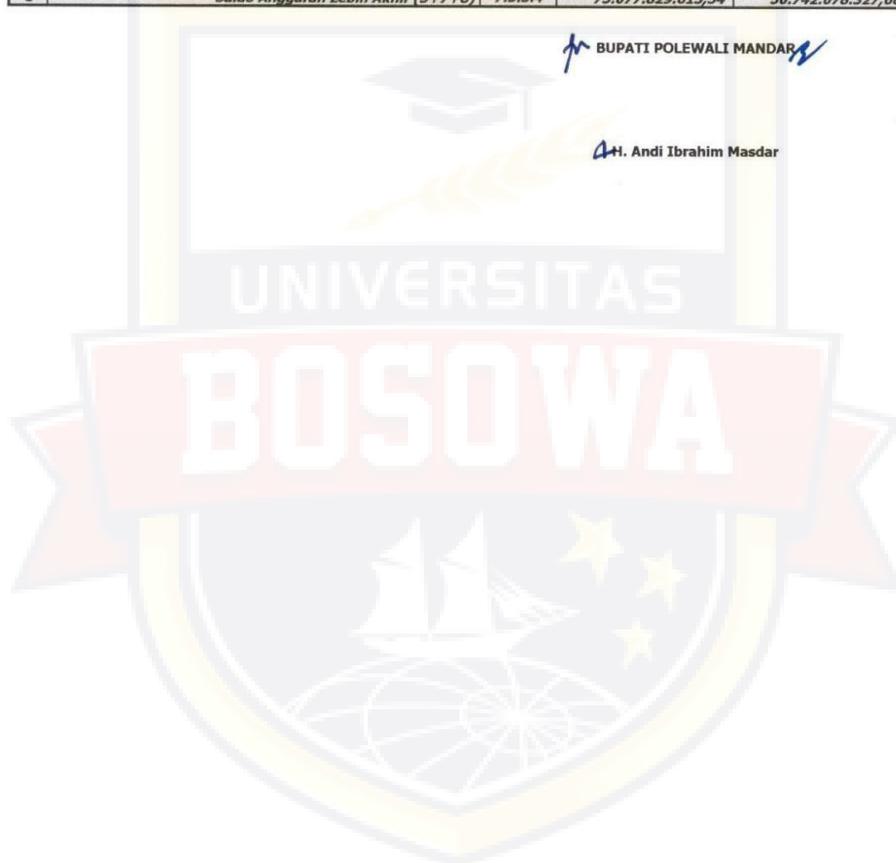
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 31 DESEMBER 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2021	2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.3.1	50.742.078.327,60	60.064.907.559,83
2	Penggunaan Sal Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.3.2	50.742.078.327,60	60.064.907.559,83
3	Sub Total (1-2)		-	-
4	Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.3.3	73.077.829.615,54	50.742.078.327,60
5	Sub Total (3+4)		73.077.829.615,54	50.742.078.327,60
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya			
7	Lain-lain			
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+7+8)	7.5.3.4	73.077.829.615,54	50.742.078.327,60

 BUPATI POLEWALI MANDAR

Ah. Andi Ibrahim Masdar



Lampiran 11 Laporan Perubahan Ekuiditas



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
EKUITAS AWAL	7.5.5.a	2.309.471.466.178,49	2.207.817.138.911,12
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.5.b	37.977.860.046,25	96.915.412.279,51
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MEND Koreksi Ekuitas	7.5.5.c	2.065.431.697,83	4.738.914.987,86
EKUITAS AKHIR	7.5.5.d	2.349.514.757.922,57	2.309.471.466.178,49

f **BUPATI POLEWALI MANDAR**

A **H. Andi Ibrahim Masdar**



Lampiran 12 Laporan Operasional 2021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
	KEGIATAN OPERASIONAL	7.5.4		
1	PENDAPATAN - LO	7.5.4.a	1.368.928.462.916,12	1.384.461.696.166,81
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.5.4.a.1	230.071.364.478,12	214.688.832.346,81
3	Pajak Daerah-LO	7.5.4.a.1.a)	26.448.362.312,98	25.201.786.203,02
4	Retribusi Daerah-LO	7.5.4.a.1.b)	19.004.287.681,00	10.766.515.489,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.5.4.a.1.c)	4.646.557.909,00	4.242.240.128,21
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	7.5.4.a.1.d)	179.972.156.575,14	174.478.290.526,58
7	PENDAPATAN TRANSFER - LO	7.5.4.a.2	1.037.032.860.610,00	1.064.377.824.296,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	7.5.4.a.2.a)	993.510.376.203,00	1.020.525.364.907,00
13	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	7.5.4.a.2.b)	43.522.484.407,00	43.852.459.389,00
18	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	7.5.4.a.2	101.824.237.828,00	105.395.039.524,00
19	Pendapatan Hibah-LO	7.5.4.a.3.a)	101.824.237.828,00	105.395.039.524,00
20	Dana Darurat-LO	7.5.4.a.3.b)	0,00	0,00
21	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00
22	BEBAN	7.5.4.b.1	1.305.995.472.362,03	1.233.819.631.212,05
23	Beban Pegawai	7.5.4.b.1.a)	581.946.201.572,00	606.654.493.965,00
24	Beban Barang dan Jasa	7.5.4.b.1.b)	460.362.937.552,78	379.955.954.857,05
25	Beban Bunga	7.5.4.b.1.c)	0,00	2.188.199.940,00
26	Beban Subsidi	7.5.4.b.1.d)	0,00	0,00
27	Beban Hibah	7.5.4.b.1.e)	37.605.083.202,66	40.417.727.590,00
28	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.b.1.f)	1.120.000.000,00	3.142.957.779,00
29	Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.b.1.g)	2.390.663.212,26	2.984.242.320,72
30	Beban Lain-lain	7.5.4.b.1.h)	0,00	0,00
31	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.5.4.b.1.i)	62.209.320.447,35	46.771.023.208,24
32	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.5.4.b.1.j)	27.111.078.279,95	17.671.355.669,06
33	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.5.4.b.1.k)	61.321.572.980,03	62.202.934.501,98
34	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.5.4.b.2.i)	394.977.636,00	152.337.267,67
35	Beban Penyusutan Aset Lainnya	7.5.4.b.1.m)	0,00	1.727.056.101,00
36	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.4.b.1.n)	144.699.940,00	165.893.773,33
37	Beban Bagi Hasil	7.5.4.b.1.o)	2.254.773.433,00	0,00
38	Beban Bantuan Keuangan	7.5.4.b.2.p)	69.134.164.106,00	69.785.454.239,00
39	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.5.4.c	62.932.990.554,09	150.642.064.954,76
40	KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.d		
41	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	0,00
42	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00
43	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		22.107.608.390,85	3.477.046.249,67
44	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	50.249.606.425,58
45	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON	7.5.4.d	(22.107.608.390,85)	(53.726.652.675,25)
46	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		40.825.382.163,25	96.915.412.279,51
47	POS LUAR BIASA	7.5.4.b.e		
48	Beban Tak Terduga		2.847.522.117,00	0,00
49	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(2.847.522.117,00)	0,00
50	SURPLUS (DEFISIT) - LO	7.5.4.f	37.977.860.046,25	96.915.412.279,51

BUPATI POLEWALI MANDAR

H. Andi Ibrahim Masdar

Lampiran 13 Neraca

**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.6.a		
2	Arus Masuk Kas :	7.5.6.a.1)		
3	Pajak Daerah		25.645.071.245,90	24.377.042.874,46
4	Retribusi Daerah		19.298.257.431,00	11.716.796.739,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.488.099.115,00	3.542.887.063,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah		211.633.099.239,70	171.881.748.380,31
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.154.508.317.303,00	1.181.858.427.907,00
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah		40.888.299.641,00	39.293.922.275,00
10	Bantuan Keuangan		0,00	5.000.000.000,00
11	Pendapatan Hibah		60.954.972.798,00	72.561.305.986,00
12	Jumlah Arus Kas Masuk	7.5.6.a.2)	1.516.416.116.773,60	1.510.232.131.224,77
13	Arus Kas Keluar			
14	Belanja Pegawai		573.232.463.477,00	601.699.768.133,00
15	Belanja Barang dan Jasa		431.240.129.328,00	340.807.449.146,00
16	Belanja Hibah		38.916.629.738,66	20.131.250.000,00
17	Belanja Bantuan Sosial		1.362.747.712,00	1.900.210.067,00
19	Belanja Tak Terduga		2.844.016.117,00	21.459.165.632,00
20	Belanja Bagi Hasil		2.254.773.433,00	0,00
21	Belanja Bantuan Keuangan		230.132.105.206,00	231.118.517.239,00
23	Jumlah Arus Kas Keluar		1.279.982.865.011,66	1.217.116.360.217,00
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.5.6.a.3)	236.433.251.761,94	293.115.771.007,77
25	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.6.b		
26	Arus Masuk Kas	7.5.6.b.1)		
27	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		558.891.988,00	310.484.076,00
28	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		81.414.000,00	156.102.009,00
29	Jumlah Arus Masuk Kas		640.305.988,00	466.586.085,00
30	Arus Keluar Kas	7.5.6.b.2)		
31	Belanja Modal Tanah		1.366.737.628,00	1.426.822.223,00
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		60.149.712.867,00	92.119.110.371,00
33	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		81.767.134.480,00	120.929.203.159,00
34	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		68.152.195.927,00	78.151.129.816,00
35	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3.302.845.560,00	10.278.920.756,00
36	Jumlah Arus Keluar Kas		214.738.626.462,00	302.905.186.325,00
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	7.5.6.b.3)	(214.098.320.474,00)	(302.438.600.240,00)
38	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.6.d		
39	Arus Masuk Kas	7.5.6.d.1)		
40	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		85.635.313.667,47	85.366.548.697,80
41	Jumlah Arus Masuk Kas		85.635.313.667,47	85.366.548.697,80
42	Arus Keluar Kas	7.5.6.d.2)		
43	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		85.625.313.667,47	85.378.316.397,80
44	Lain lain		1.137.151.779,20	0,00
45	Jumlah Arus Keluar Kas		86.762.465.446,67	85.378.316.397,80
46	Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris	7.5.6.d.3)	(1.127.151.779,20)	(11.767.700,00)
47	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Sbb:	7.5.6.e	21.207.779.508,74	(9.334.596.932,23)
48	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.6.f	51.574.728.556,80	59.771.353.709,83
49	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.6.g	72.782.508.065,54	50.436.756.777,60
50	Saldo Akhir Kas Lainnya	7.5.6.h	111.176.324,40	1.137.151.779,20
51	Saldo Akhir Kas di Bendahara	7.5.6.i	17.026.000,00	820.000,00
52	Saldo Akhir Kas	7.5.6.j	72.910.710.389,94	51.574.728.556,80

 **BUPATI POLEWALI MANDAR**

A.H. Andi Ibrahim Masdar



**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
31 DESEMBER 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2021	2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.3.1	50.742.078.327,60	60.064.907.559,83
2	Penggunaan Sal Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.3.2	50.742.078.327,60	60.064.907.559,83
3	Sub Total (1-2)		-	-
4	Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.3.3	73.077.829.615,54	50.742.078.327,60
5	Sub Total (3+4)		73.077.829.615,54	50.742.078.327,60
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya			
7	Lain-lain			
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+7+8)	7.5.3.4	73.077.829.615,54	50.742.078.327,60

 **BUPATI POLEWALI MANDAR**

 **Andi Ibrahim Masdar**



Lampiran 14 Laporan Realisasi Anggaran 2021 – 2020



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	LEBIH/KURANG	(%)	REALISASI TAHUN 2020
1	PENDAPATAN	7.5.2.a	1.460.101.653.437,00	1.517.057.242.761,60	(56.955.589.324,60)	103,90	1.510.698.717.309,77
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.5.2.a.1	203.690.330.171,00	260.705.653.019,60	(57.015.322.848,60)	127,99	211.985.061.141,77
3	Pajak Daerah	7.5.2.a.1.a)	26.449.586.090,00	25.645.071.245,90	804.514.844,10	96,96	24.377.042.874,46
4	Retribusi Daerah	7.5.2.a.1.b)	16.783.188.100,00	19.298.257.431,90	(2.515.069.331,00)	114,99	11.716.796.739,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.2.a.1.c)	4.297.813.372,00	3.488.099.115,00	809.714.257,00	81,16	3.542.887.063,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.2.a.1.d)	156.159.742.609,00	212.274.225.227,70	(56.114.482.618,70)	135,93	172.348.334.465,31
7	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.2.a.2	1.194.736.823.266,00	1.195.396.616.944,00	(659.793.678,00)	100,06	1.226.152.350.182,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.161.437.091.000,00	1.154.508.317.303,00	6.928.773.697,00	99,40	1.181.858.427.907,00
9	Dana Perimbangan	7.5.2.a.2.a)	967.715.930.000,00	961.122.278.203,00	6.593.651.797,00	99,32	1.012.302.581.907,00
10	Dana Insentif Daerah (DID)	7.5.2.a.2.b)	32.388.098.000,00	32.388.098.000,00	0,00	100,00	8.222.783.000,00
11	Dana Desa	7.5.2.a.2.c)	161.333.063.000,00	160.997.941.100,00	335.121.900,00	99,79	161.333.063.000,00
13	Pendapatan Transfer Antar Daerah		33.299.732.266,00	40.888.299.641,00	(7.588.567.375,00)	122,79	39.293.922.275,00
14	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.2.a.2.e)	33.299.732.266,00	40.888.299.641,00	(7.588.567.375,00)	122,79	39.293.922.275,00
15	Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
16	Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah Provinsi Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.5.2.a.3	61.674.500.000,00	60.954.972.798,00	719.527.202,00	98,83	72.561.305.986,00
18	Pendapatan Hibah	7.5.2.a.3.a)	61.674.500.000,00	60.954.972.798,00	719.527.202,00	98,83	72.561.305.986,00
19	BELANJA	7.5.2.b	1.547.425.280.308,56	1.494.721.491.473,66	52.703.788.834,90	96,59	1.520.021.546.542,00
21	BELANJA OPERASI	7.5.2.b.1	1.082.648.561.057,56	1.044.751.970.255,66	37.896.590.801,90	96,50	964.538.677.346,00
22	Belanja Pegawai	7.5.2.b.1.a)	613.741.911.460,00	573.232.463.477,00	40.509.447.983,00	93,40	601.699.768.133,00
23	Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.b.1.b)	426.837.439.485,56	431.240.129.328,00	(4.402.689.842,44)	101,03	340.807.449.146,00
24	Belanja Hibah	7.5.2.b.1.c)	40.526.462.400,00	38.916.629.738,66	1.609.832.661,34	96,03	20.131.250.000,00
25	Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.b.1.d)	1.542.747.712,00	1.362.747.712,00	180.000.000,00	88,33	1.900.210.067,00
26	BELANJA MODAL	7.5.2.b.2	227.844.768.402,00	214.738.626.462,00	13.106.141.940,00	94,25	302.905.186.325,00
27	Belanja Tanah	7.5.2.b.2.a)	1.367.295.802,00	1.366.737.628,00	558.175,00	99,96	1.426.822.221,00
28	Belanja Perlatan dan Mesin	7.5.2.b.2.b)	63.241.423.147,00	60.149.712.867,00	3.091.710.280,00	95,11	92.119.110.371,00
29	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.2.b.2.c)	86.567.547.616,00	81.767.134.480,00	4.800.413.136,00	94,45	120.929.203.159,00
30	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.2.b.2.d)	73.116.559.180,00	68.152.195.927,00	4.964.363.253,00	93,21	78.151.129.816,00
31	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.2.b.2.e)	3.551.942.676,00	3.302.845.560,00	249.097.116,00	92,99	10.278.920.758,00
32	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.2.b.3	3.000.000.000,00	2.844.016.117,00	155.983.883,00	94,80	21.459.165.632,00
33	Belanja Tak Terduga	7.5.2.b.3)	3.000.000.000,00	2.844.016.117,00	155.983.883,00	94,80	21.459.165.632,00
35	BELANJA TRANSFER	7.5.2.c	233.931.950.849,00	232.386.878.639,00	1.545.072.210,00	99,34	231.118.517.239,00
36	Belanja Bagi Hasil	7.5.2.c.1)	3.089.630.643,00	2.254.773.433,00	834.857.210,00	72,98	0,00
37	Belanja Bantuan Keuangan	7.5.2.c.2)	230.842.320.206,00	230.132.105.206,00	710.215.000,00	99,69	231.118.517.239,00

NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	LEBIH/KURANG	(%)	REALISASI TAHUN 2020
38	SURPLUS / DEFISIT	7.5.2.c	(87.323.626.871,56)	22.335.751.287,94	(109.659.378.159,50)	100	(9.322.829.232,23)
39	PEMBIAYAAN	7.5.2.d					
40	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.2.d.1	66.020.494.411,00	50.742.078.327,60	(15.278.416.083,40)	76,86	60.064.907.559,83
41	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		66.020.494.411,00	50.742.078.327,60	(15.278.416.083,40)	76,86	60.064.907.559,83
42	PEMBIAYAAN NETTO		66.020.494.411,00	50.742.078.327,60	(15.278.416.083,40)	0,00	60.064.907.559,83
43	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(21.303.132.460,56)	73.077.829.615,54		0,00	50.742.078.327,60

BUPATI POLEWALI MANDAR

Andi Ibrahim Masdar

Lampiran 15 Laporan Perubahan Ekuiditas 2022



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	2.355.257.622.608,25	2.309.471.466.178,49
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.189.610.601,14	46.052.110.713,44
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	9.393.614.911,82	(265.954.283,68)
EKUITAS AKHIR	2.369.840.848.121,21	2.355.257.622.608,25

Polewali, 07 Maret 2023

BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ANDLIBRAHIM MASDAR



Lampiran 16 Laporan Operasional 2022 – 2021

 PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR LAPORAN OPERASIONAL Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021					
KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN DAERAH-LO	1.318.918.663.471,95	1.379.976.661.523,32	(61.057.998.051,37)	-4,42
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	229.403.482.847,77	241.119.583.085,32	(11.716.096.237,55)	-4,86
7.1.01	Pajak Daerah-LO	30.820.237.653,14	26.448.362.312,88	4.369.875.340,26	16,29
7.1.02	Rembu Daerah-LO	11.560.624.616,37	15.025.787.181,02	(7.465.162.564,65)	-39,24
7.1.03	Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	4.369.333.211,00	15.660.557.909,00	(11.291.224.698,00)	-72,10
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	182.638.287.417,26	179.984.875.682,34	2.653.411.734,92	1,47
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	983.135.327.632,18	1.037.032.860.610,00	(53.897.532.977,82)	-5,20
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	993.877.153.791,18	993.510.376.203,00	(36.663.162.469,82)	-4,00
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	49.258.173.841,00	43.522.484.407,00	5.735.689.434,00	13,19
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	106.379.852.992,00	101.824.237.828,00	4.555.615.164,00	4,47
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	106.379.852.992,00	101.824.237.828,00	4.555.615.164,00	4,47
8	BEBAN DAERAH	1.311.604.119.921,81	1.308.969.420.202,03	2.634.699.619,78	0,20
8.1	BEBAN OPERASI	1.066.285.961.458,58	1.096.607.874.624,70	(30.322.013.166,12)	-1,87
8.1.01	Beban Pegawai	617.381.779.817,50	591.940.261.152,00	36.455.517.245,60	6,09
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	416.627.921.151,35	463.545.826.637,78	(46.918.005.486,43)	-10,12
8.1.05	Beban Hibah	28.229.022.450,00	37.605.083.202,66	(11.376.060.752,66)	-30,25
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	4.123.624.600,00	1.120.000.000,00	3.003.624.600,00	298,18
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	1.823.914.426,73	2.390.632.124,26	(467.148.775,53)	-19,54
8.2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	175.364.579.524,23	150.972.658.138,33	24.331.911.785,90	16,12
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	65.202.837.012,02	62.208.955.446,35	2.993.881.566,67	4,81
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.891.609.915,21	26.902.527.540,95	17.989.082.374,26	66,87
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Higasi	64.665.192.314,00	61.321.447.575,03	3.343.744.738,97	5,45
8.2.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	405.124.076,33	394.977.636,00	10.146.440,33	2,57
8.2.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	139.816.609,67	144.609.940,00	(4.793.330,33)	-3,37
8.3	BEBAN TRANSFER	70.013.678.542,00	71.388.637.536,00	(1.375.258.997,00)	-1,93
8.3.01	Beban Bagi Hasil	3.156.376.342,00	2.254.773.433,00	901.602.909,00	39,99
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	66.857.302.200,00	69.134.164.103,00	(2.276.861.903,00)	-3,29
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	7.314.543.550,14	71.007.241.221,29	(63.692.697.671,15)	-89,70
8.5.01	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Defisit Penjualan/Perukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	22.107.608.390,85	(22.107.608.390,85)	-100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(22.107.608.390,85)	22.107.608.390,85	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	7.314.543.550,14	48.899.632.830,44	(41.585.089.280,30)	-85,04
	POS LUAR BIASA				

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
8.4.01	Beban Tak Terduga	2.124.932.949,00	2.847.522.117,00	(722.589.168,00)	-25,38
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(2.124.932.949,00)	(2.847.522.117,00)	722.589.168,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.189.610.601,14	46.052.110.713,44	(40.862.500.112,30)	-88,73

Polewali, 07 Maret 2023
 BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR

Lampiran 17 Laporan Perubahan Saldo Anggaran 2022 – 2021



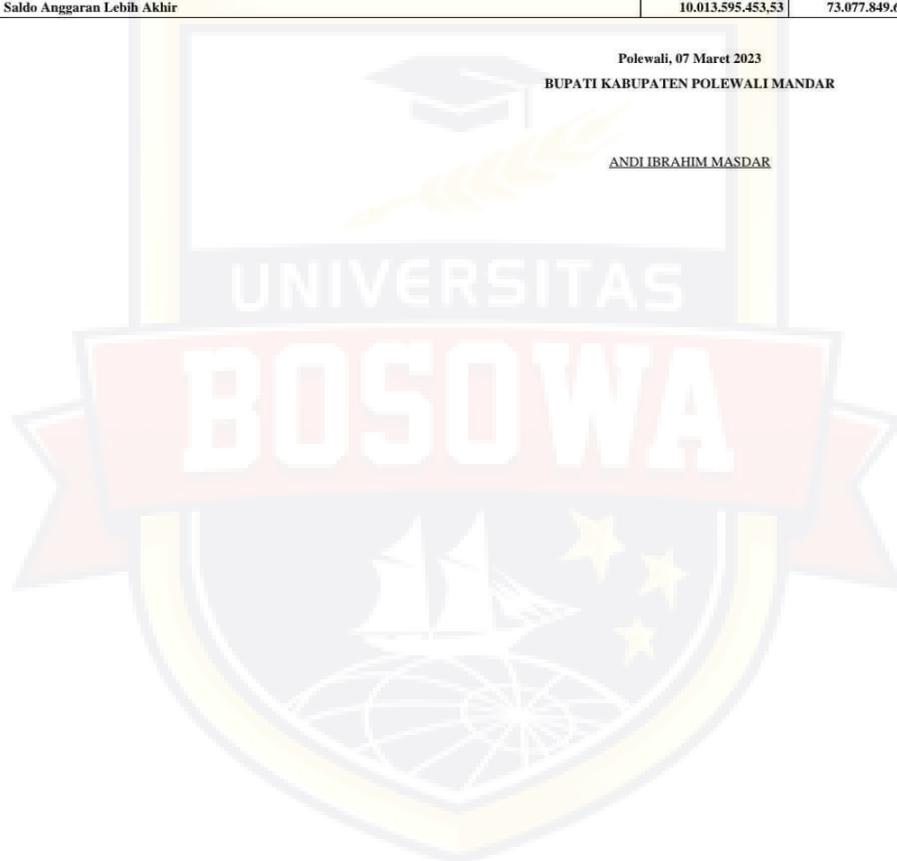
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	73.077.849.615,54	50.742.078.327,60
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	73.077.849.615,54	50.742.078.327,60
SubTotal	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	10.013.595.453,53	73.077.849.615,54
SubTotal	10.013.595.453,53	73.077.849.615,54
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	10.013.595.453,53	73.077.849.615,54

Polewali, 07 Maret 2023

BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ANDILIBRAHIM MASDAR



Lampiran 18 Neraca 2022 – 2021



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	164.594.332,22	25.408.233.958,83
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	17.026.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	559.472.176,00	1.268.487.551,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	7.557.595.588,13	45.605.046.839,71
Kas di Bendahara BOS	53.004.635,00	495.122.744,00
Kas di Bendahara FKTP	93.763.936,00	5.636.972,00
Kas Lainnya	4.743.462.957,58	115.118.782,60
Piutang Pajak Daerah	10.951.402.137,41	10.749.881.180,57
Piutang Retribusi	977.979.300,00	762.322.500,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	37.079.956.289,21	16.028.788.211,38
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	11.094.759.518,00	10.419.419.455,00
Penyisihan Piutang	(27.013.755.878,28)	(25.663.020.757,84)
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	13.821.140.892,00	5.065.000.000,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	16.007.929.229,01	18.731.449.973,86
JUMLAH ASET LANCAR	76.091.305.112,28	109.008.513.411,11
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen	39.268.050.095,82	38.812.801.980,82
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	39.268.050.095,82	38.812.801.980,82
ASET TETAP		
Tanah	354.588.654.954,50	349.145.931.703,50
Peralatan dan Mesin	554.546.570.886,13	493.079.200.086,13
Gedung dan Bangunan	1.251.861.492.987,31	1.166.282.623.511,65
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.122.106.260.784,27	1.069.352.535.490,27
Aset Tetap Lainnya	7.666.376.508,35	7.535.511.060,35
Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.478.602.766,11	35.085.213.457,77
Akumulasi Penyusutan	(1.111.893.171.699,76)	(941.603.483.869,20)
JUMLAH ASET TETAP	2.218.354.787.186,91	2.178.877.531.440,47
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	10.714.980.802,00	11.599.865.194,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	851.262.939,99	857.262.939,99
Aset Tidak Berwujud Lainnya	2.478.020.500,00	2.365.020.500,00
Aset Lain-lain	84.517.987.428,19	81.793.007.307,19
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.177.045.115,00)	(2.037.228.508,33)
JUMLAH ASET LAINNYA	96.385.206.555,18	94.577.927.432,85
JUMLAH ASET	2.430.099.348.950,19	2.421.276.774.265,25
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.237.333,00	0,00
Utang Belanja	41.990.546.204,00	58.001.055.855,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	18.260.717.293,48	8.018.095.803,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	60.258.500.830,48	66.019.151.658,00
JUMLAH KEWAJIBAN	60.258.500.830,48	66.019.151.658,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	2.364.651.237.519,57	2.355.257.622.608,25
JUMLAH EKUITAS	2.364.651.237.519,57	2.355.257.622.608,25
JUMLAH EKUITAS	2.364.651.237.519,57	2.355.257.622.608,25
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.424.909.738.350,05	2.421.276.774.266,25